



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06B / HUK / 2010

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI 50 (LIMA PULUH) KABUPATEN
DAERAH TERTINGGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial maka perlu menyusun program prioritas Kementerian Sosial RI sebagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan keadilan daerah tertinggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 (lima puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI 50 (LIMA PULUH) KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL.
- PERTAMA** : Menetapkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 (lima puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 (lima puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan sebagai acuan bagi kabupaten di daerah tertinggal dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2010

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator di Bidang Kesejahteraan Sosial RI.
2. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Para Gubernur di 50 (lima puluh) Daerah Tertinggal seluruh wilayah Indonesia.
5. Para Bupati di 50 (lima puluh) Daerah Tertinggal seluruh wilayah Indonesia.
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI.
8. Para Kepala Dinas/Instansi Sosial di 50 (lima puluh) Daerah Tertinggal seluruh wilayah Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06B / HUK / 2010

TANGGAL : 21 JANUARI 2010

**TENTANG : PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI 50 (LIMA PULUH) KABUPATEN
DAERAH TERTINGGAL**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Kemiskinan	4
2. Ketelantaran	6
3. Kecacatan.....	7
4. Keterpencilan.....	7
5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku	8
6. Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.....	9
BAB II PROFIL 50 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL.....	10
1. Kabupaten Aceh Timur	10
2. Kabupaten Aceh Selatan.....	13
3. Kabupaten Pakpak Bharat.....	17
4. Kabupaten Nias Selatan.....	20
5. Kabupaten Padang Pariaman.....	23
6. Kabupaten Pasaman.....	27
7. Kabupaten Kuantan Singingi.....	31
8. Kabupaten Sarolangun.....	34
9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	38
10. Kabupaten Ogan Ilir	42
11. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan	46
12. Kabupaten Kaur	49
13. Kabupaten Bengkulu Utara.....	52
14. Kabupaten Way Kanan.....	56
15. Kabupaten Belitung Timur.....	60
16. Kabupaten Belitung.....	64
17. Kabupaten Karimun	68
18. Kabupaten Garut.....	71
19. Kabupaten Sukabumi.....	76
20. Kabupaten Rembang.....	80

21. Kabupaten Sampang	84
22. Kabupaten Lebak.....	87
23. Kabupaten Pandeglang	91
24. Kabupaten Lombok Barat.....	95
25. Kabupaten Dompu	99
26. Kabupaten Rote Ndao.....	103
27. Kabupaten Kupang	106
28. Kabupaten Landak.....	109
29. Kabupaten Bengkayang.....	112
30. Kabupaten Katingan.....	115
31. Kabupaten Pulang Pisau.....	118
32. Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	122
33. Kabupaten Barito Kuala.....	125
34. Kabupaten Malinau.....	129
35. Kabupaten Nunukan	132
36. Kabupaten Kepulauan Talaud.....	135
37. Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	139
38. Kabupaten Poso	143
39. Kabupaten Tojo Una-Una.....	146
40. Kabupaten Jeneponto	149
41. Kabupaten Luwu.....	152
42. Kabupaten Buton.....	155
43. Kabupaten Konawe.....	158
44. Kabupaten Boalemo	162
45. Kabupaten Mamasa	164
46. Kabupaten Seram Bagian Timur.....	168
47. Kabupaten Maluku Tenggara Barat.....	171
48. Kabupaten Halmahera Barat.....	174
49. Kabupaten Mimika.....	177
50. Kabupaten Teluk Bintuni.....	180
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	183
A. Visi Kementerian Sosial RI	183
B. Misi Kementerian Sosial RI	183

C. Tujuan.....	184
D. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial RI.....	184
BAB IV AZAS-AZAS PENYELENGGRAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.....	187
BAB V PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS.....	188
A. Program Rehabilitasi Sosial.....	188
B. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	191
C. Program Pemberdayaan Sosial	195
D. Penyuluhan Sosial	199
E. Pola Konsentrasi	200
BAB VI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN	201
BAB VII PENUTUP	202

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang lebih dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, juga tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial RI telah berhasil melakukan identifikasi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ke dalam lima isu strategis, yakni kemiskinan (atau kefakirmiskinan), kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, dan korban bencana. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial. Di dalam lima isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar, komunitas adat terpencil, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

1. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut data BPS per Maret 2008 sebanyak 34,96 juta jiwa (15,42 persen). Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin

sebanyak 36,10 juta jiwa (16,66 persen). Berarti selama tahun 2004-2008 terjadi penurunan sebesar 1,14 juta jiwa (3,15 persen). Rendahnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan sebagai akibat:

1. Kejadian bencana alam sepanjang tahun 2005-2008;
2. Terjadinya krisis ekonomi global, tingginya kurs nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah yang berdampak terhadap tingginya harga keperluan pada berbagai sektor dan memicu kenaikan harga pada sektor lainnya;
3. Kejadian bencana sosial, seperti korban konflik sosial.

Walaupun terjadi penurunan jumlah, namun dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk dalam kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus-menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Jumlah keluarga fakir miskin menurut data Pusdatin Kesos tahun 2008 sebanyak 3.274.060 KK. Jumlah ini akan semakin bertambah mengingat masih adanya kelompok masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2.456.521 KK dan Keluarga Rentan (KR) sebanyak 1.885.014 KK (Pusdatin Kesos, 2008).

Selain itu, terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin; tidak tersedianya pelayanan sosial dasar; tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis).

Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena berisiko menjadi kemiskinan budaya (*culture poverty*), tidak ada kemauan/pasrah/patah semangat (fatalistik) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan asosial, antisosial, perilaku destruktif atau terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian, perdagangan

ilegal napza, pelacuran, perdagangan manusia, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lain yang pada akhirnya dapat mengganggu keberfungsian sosial manusia.

2. Ketelantaran

Ketelantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Berdasarkan data, pada tahun 2008 jumlah balita telantar 299.127 balita, dan anak telantar 2.250.152 anak, anak jalanan 109.454 anak. (Sumber: Pusdatin Kesejahteraan Sosial). Sementara itu, jumlah lanjut usia telantar pada tahun 2008 telah mencapai 1.644.002 lansia. Data ini menunjukkan sebanyak 23,29 persen dari jumlah data PMKS masuk pada kriteria kelompok terlantar. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja melalui usaha pelebagaan para lanjut usia.

Seperti halnya permasalahan anak telantar, maka permasalahan utama yang dihadapi Kementerian Sosial RI adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah, karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas SDM Indonesia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan global. Berbagai kebijakan dan program perlu ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan masalah ketelantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah, padahal keberhasilan pembangunan tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah lanjut usia dalam struktur kependudukan. Jumlah manusia lanjut usia pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 15,3 juta orang atau 7,6 persen dari jumlah

penduduk dan pada tahun 2005 manusia lanjut usia diperkirakan akan meningkat menjadi 22 juta orang dari jumlah penduduk pada tahun 2020. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar kualitas hidup mereka terjamin sampai kematian.

3. Kecacatan

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keleluasan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan.

Jumlah penyandang cacat berdasarkan Pusdatin Kesejahteraan Sosial Tahun 2008 sebanyak 1.544.184 orang, (meliputi cacat fisik, mental, cacat ganda). Namun demikian, jumlah yang sebenarnya jauh lebih besar dari data yang ada. Hal ini karena keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami kecacatan sering kali menyembunyikannya sehingga penyandang cacat tidak dapat tersentuh pelayanan.

4. Keterpencilan

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 229.479 KK komunitas adat terpencil yang tersebar di 182 lokasi, 158 desa, 139 kecamatan, 82 kabupaten di 30 provinsi. (Sumber: Direktorat PKAT). Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait dengan HAM, lingkungan, integrasi sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan, baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Keadaan ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tunasusila, eks narapidana dan penyalah guna napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) serta penderita HIV/AIDS.

Masalah kesejahteraan sosial berupa ketunaan sosial menyangkut 239.699 orang, yang terdiri atas tunasusila 63.661 orang, pengemis 35.057 orang, gelandangan 25.161 orang, dan eks napi 115.820 orang. Sementara jumlah penyimpangan perilaku belum ada datanya. (Sumber: Pusdatin Kesejahteraan Sosial tahun 2008). Selain disebabkan masalah kemiskinan, ketunaan sosial juga merupakan akibat dari ketidakmampuan kelompok tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga keberfungsian sosial mereka terganggu.

Potret permasalahan lainnya adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi pada semua tingkat usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan. Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu, dan mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak.

Mereka hidup menggelandang/mengemis, menjual diri, bahkan terjerumus menggunakan napza karena ketidakmampuannya, dan "tidak utuhnya" pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial. Pemerintah perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh agar

tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih memandang manusia sebagai subjek/pelaku yang akan menggerakkan laju pertumbuhan ke arah masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

6. Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Kondisi geografisnya berbentuk kepulauan yang tersebar luas dan dipersatukan oleh laut-laut di antara pulau-pulau. Namun, terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana. Secara akumulatif, bencana alam yang timbul menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,5 triliun setiap tahunnya dan sampai dengan tahun 2008 telah mengakibatkan korban sebanyak 1.608.829 jiwa, serta dalam banyak hal telah memusnahkan berbagai hasil pembangunan.

Kejadian alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang mempunyai wilayah luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis, keadaan geologis, iklim, dan fisiografi suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan terhadap bencana alam di mana terdapat 500 gunung api (129 aktif), terdiri atas kepulauan (2/3 air), 500 sungai besar dan kecil (30 persen) yang melintasi permukiman padat penduduk.

Bencana lain yang juga mengancam tatanan sosial dan ekonomi Indonesia adalah bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (*man-made disasters*) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Permasalahan pengungsi akibat bencana sosial yang pada awal 2004 menyangkut 2,5 juta orang, sampai dengan tahun 2008 telah diselesaikan semua melalui program relokasi dan pemulangan ke daerah asal. Berbagai konflik dan kerusakan sosial beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat di tanah air.

Hal ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Untuk itu, penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya.

BAB II

PROFIL 50 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL

1. Kabupaten Aceh Timur



Gambar 1
Lambang Kabupaten Aceh Timur

1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia, beribukota di Idi Rayeuk dengan luas wilayah 6.906 km² mempunyai Penduduk sebanyak 352.927 jiwa dengan kepadatan 52 jiwa/km². Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 21 kecamatan dan 580 desa/kelurahan wilayah administratif · Kabupaten ini berbatasan dengan selat Malaka di bagian utara dan timur, Kota Langsa di bagian selatan dan kabupaten Aceh Utara di bagian barat. Situs web resmi: <http://aceh-timur.go.id>.



Gambar 2
Peta lokasi Kabupaten Aceh Timur

1.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	11
Nama Provinsi	Nangroe Aceh Darussalam
Kode Kabupaten	1105
Nama Kabupaten	Aceh Timur
Balita Telantar	24.274 jiwa
Anak Telantar	96.377 jiwa
Lanjut Usia Telantar	13.485 jiwa
Penyandang Cacat	1.880 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	8.324 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	9.888 RT
Miskin	28.072 RT
Hampir Miskin	21.676 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	50.556 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	11
Nama Provinsi	Nangroe Aceh Darussalam
Kode Kabupaten	1105
Nama Kabupaten	Aceh Timur
Pekerja Sosial Masyarakat	500 Orang
Organisasi Sosial	6 Orsos
Karang Taruna	511 KT

1.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Jl. Pendopo IdieTelp. (0641) 21004, Fax. 21739.

1.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

Kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian Sosial RI di kabupaten Aceh Timur antara lain :

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Aceh Timur antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009.

b. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 971 KK atau 3.958 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 250 KK (1.069 jiwa) sedangkan 721 KK (2889 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 225 klien di 7 panti sosial anak pada tahun 2009.

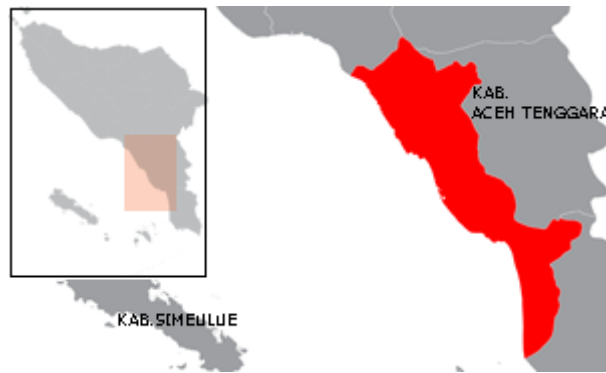
2. Kabupaten Aceh Selatan

2.1. Kondisi Geografis



Gambar 3
Lambang Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi barat Aceh, beribukota di Tapak Tuan dengan luas wilayah 4.005 km² mempunyai Penduduk sebanyak 206.252 jiwa dengan kepadatan 52 jiwa/km². Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 16 kecamatan dan 369 desa/kelurahan wilayah administratif. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil di bagian utara dan timur, kabupaten Aceh Tenggara di bagian selatan dan kabupaten Aceh Barat Daya di bagian barat.



Gambar 4
Peta lokasi kabupaten Aceh Selatan

2.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	11
Nama Provinsi	Nangroe Aceh Darussalam
Kode Kabupaten	1103
Nama Kabupaten	Aceh Selatan
Balita Telantar	11.435 jiwa
Anak Telantar	50.730 jiwa
Lanjut Usia Telantar	10.940 jiwa
Penyandang Cacat	2.434 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	4.961 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	6.037 RT
Miskin	13.064 RT
Hampir Miskin	16.121 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	30.136 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	11
Nama Provinsi	Nangroe Aceh Darussalam

Kode Kabupaten	1103
Nama Kabupaten	Aceh Selatan
Pekerja Sosial Masyarakat	440 Orang
Organisasi Sosial	11 Orsos
Karang Taruna	248 KT

2.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Aceh Timur Jl. T.R. Angkasah No. 25. Kel.Lhok bengkuan Telp./Fax. (0656) 21134.

2.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Aceh Timur antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009.

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Timur antara lain pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) pada tahun 2009.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 400 klien di 10 panti sosial anak dan 1 panti sosial lanjut usia pada tahun 2009.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 30 orang korban tindak kekerasan pada tahun 2008.

3. Kabupaten Pakpak Bharat

3.1. Kondisi Geografis



Gambar 5
Lambang Kabupaten Pakpak Bharat

Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 hasil dari pemekaran Kabupaten Dairi, beribukota di Salak dengan luas wilayah 1.218 km² mempunyai penduduk sebanyak 32.909. Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 8 kecamatan dan 36 desa/kelurahan wilayah administratif. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Dairi di bagian utara, kabupaten Toba Samosir kabupaten Humbang Hasundutan di bagian timur, kabupaten Humbang Hasundutan, kabupaten Tapanuli Tengah di bagian selatan sedangkan di bagian barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Singkil.



Gambar 6
Peta Lokasi Kabupaten Pakpak Bharat

3.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	12
Nama Provinsi	Sumatera Utara
Kode Kabupaten	1216
Nama Kabupaten	Pakpak Bharat
Balita Telantar	3.099 jiwa
Anak Telantar	10.782 jiwa
Lanjut Usia Telantar	1.470 jiwa
Penyandang Cacat	319 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	478 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	983 RT
Miskin	1.788 RT
Hampir Miskin	2.457 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	5.052 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	12
Nama Provinsi	Sumatera Utara
Kode Kabupaten	1216
Nama Kabupaten	Pakpak Bharat
Karang Taruna	80 KT

3.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Transmigrasi Kabupaten Pakpak Bharat Kompleks Panorama Indah Sindeka, Salak Telp. (0627) 433001

3.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2009 antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 389 KK atau 1.813 jiwa, sedang diberdayakan sebanyak 74 KK (387 jiwa) sedangkan 315 KK (1.426 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

4. Kabupaten Nias Selatan



Gambar 7
Lambang Kabupaten Nias Selatan

4.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Nias Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di pulau Nias, beribukota di Teluk Dalam dengan luas wilayah 1.825 km² berpenduduk sebanyak 275.243 jiwa dan terdiri dari 8 kecamatan dan 216 desa/kelurahan. Nias Selatan sebelumnya adalah bagian Kabupaten Nias. Status otonom diperoleh pada 25 Februari 2003 dan diresmikan pada 28 Juli 2003. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Nias di bagian utara, kabupaten Mandailing Natal di bagian timur, kabupaten Kepulauan Mentawai di bagian selatan dan samudera Hindia di bagian barat.



Gambar 8
Peta Lokasi Kabupaten Nias Selatan

4.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	12
Nama Provinsi	Sumatera Utara
Kode Kabupaten	1214
Nama Kabupaten	Nias Selatan
Balita Telantar	19.692 jiwa
Anak Telantar	84.007 jiwa
Lanjut Usia Telantar	7.100 jiwa
Penyandang Cacat	3.085 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	3.179 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	6.211 RT
Miskin	13.931 RT
Hampir Miskin	16.775 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	36.060 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	12
Nama Provinsi	Sumatera Utara
Kode Kabupaten	1214
Nama Kabupaten	Nias Selatan
Organisasi Sosial	3 Orsos
Karang Taruna	220 KT

4.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial kabupaten Nias Selatan Jl. Lagundri Km. 7, Teluk Dalam d/h
Jl. Saonigebo Km. 2,5 Teluk Dalam.

4.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Nias Selatan antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009.

b. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 149 KK atau 601 jiwa, sedang diberdayakan sebanyak 99 KK (366 jiwa) sedangkan 50 KK (235 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 80 klien di 5 panti sosial anak pada tahun 2009.

C. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

5. Kabupaten Padang Pariaman



Gambar 9
Lambang Kabupaten Padang Pariaman

5.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Padang Pariaman beribukota di Parit Malintang dengan luas wilayah 1.328,79 km² berpenduduk sebanyak 378.208 jiwa dengan kepadatan 278,82 jiwa/km². Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan dan 45 nagari. Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan kabupaten Agam di bagian utara, di bagian timur berbatasan dengan kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar, kabupaten kota Padang di bagian selatan sedangkan di bagian barat berbatasan dengan selat Mentawai dan kota Pariaman.



Gambar 10
Peta Lokasi Kabupaten Padang Pariaman

5.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	13
Nama Provinsi	Sumatera Barat
Kode Kabupaten	1306
Nama Kabupaten	Padang Pariaman
Balita Telantar	6.816 jiwa
Anak Telantar	34.665 jiwa
Lanjut Usia Telantar	9.487 jiwa
Penyandang Cacat	2.180 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	3.302 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	3.124 RT
Miskin	7.249 RT
Hampir Miskin	9.482 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	16.786 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	13
Nama Provinsi	Sumatera Barat
Kode Kabupaten	1306
Nama Kabupaten	Padang Pariaman
Pekerja Sosial Masyarakat	355 Orang
Organisasi Sosial	24 Orsos
Karang Taruna	213 KT

5.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Padang Pariaman
Jl. Sam Ratulangi No. 30 Pariaman Telp. 91127

5.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga pada tahun 2009 di Kabupaten Padang Pariaman antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Padang Pariaman antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 50 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2009, 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2008 dan 25 KUBE pada tahun 2007. Selain itu pada tahun 2008 juga telah dilaksanakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) sebanyak 100 unit.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2009 antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 225 klien di 2 panti sosial anak, 2 panti sosial lanjut usia, dan 1 panti sosial penyandang cacat. Selain itu juga telah dilaksanakan pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) kepada 64 orang dan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat kepada 12 orang.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam antara lain pemberian bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana sebanyak 1 unit mobil *Rescue Tactical Unit* (RTU).

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 3 orang pekerja migran tahun 2009.

c. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial antara lain pemberian bantuan

pembangunan musholla Al-Huda, Durian Tuga Korong Malai, kecamatan Batang Kasan dan masjid At Taqwa, kt. Magek Korong Balai Baik, kecamatan IV Koto Amal.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

6. Kabupaten Pasaman



Gambar 11
Lambang Kabupaten Pasaman

6.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pasaman beribukota di Lubuk Sikaping dengan luas wilayah 7.835 km² berpenduduk sebanyak 513.244 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 14 kecamatan dan 211 desa/kelurahan wilayah administratif. Kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara di bagian utara, provinsi Riau dan kabupaten Limapuluh Kota di bagian timur, kabupaten Agam di bagian selatan dan provinsi Sumatera Utara dan samudera Hindia di bagian barat.



Gambar 12
Peta Lokasi Kabupaten Pasaman

6.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	13
Nama Provinsi	Sumatera Barat
Kode Kabupaten	1309
Nama Kabupaten	Pasaman
Balita Telantar	9.600 jiwa
Anak Telantar	35.987 jiwa
Lanjut Usia Telantar	7.512 jiwa
Penyandang Cacat	1.584 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	3.235 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	4.327 RT
Miskin	8.649 RT
Hampir Miskin	8.824 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	19.895 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	13
Nama Provinsi	Sumatera Barat
Kode Kabupaten	1309
Nama Kabupaten	Pasaman
Pekerja Sosial Masyarakat	21 Orang
Organisasi Sosial	9 Orsos
Karang Taruna	76 KT

6.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Pasaman Jl. Syahrudin Dalik
Lubuk Sikaping Telp. (0753) 20470

6.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Pasaman tahun 2009 antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Pasaman antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 50 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2009. Selain itu pada tahun 2009 juga telah dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) sebanyak 100 unit dengan sumber dana dari APBN dan 100 unit yang berasal dari dana UKS.

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Pasaman sebanyak 75 KK atau 329 jiwa yang semuanya belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 225 klien di 6 panti sosial anak dan 1 panti sosial penyandang cacat pada tahun 2009. Selain itu pada tahun 2009 juga telah diserahkan bantuan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat kepada 12 orang.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 20 orang korban tindak kekerasan pada tahun 2007.

b. Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial antara lain Pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos.

c. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial antara lain pemberian bantuan untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 unit.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

7. Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 13
Lambang Kabupaten Kuantan Singingi

7.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi adalah beribukota di Taluk Kuantan dengan luas wilayah 7.656 km² berpenduduk sebanyak 243.314 jiwa dengan kepadatan 28 jiwa/km². Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan dan 199 desa/kelurahan wilayah administratif. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan di bagian utara dan kabupaten Indragiri Hulu di bagian timur, provinsi Jambi di bagian selatan dan provinsi Sumatera Barat di bagian barat.



Gambar 14
Peta Lokasi Kabupaten Kuantan Singingi

7.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	14
Nama Provinsi	Riau
Kode Kabupaten	1401
Nama Kabupaten	Kuantan Singingi
Balita Telantar	4.712 jiwa
Anak Telantar	18.577 jiwa
Lanjut Usia Telantar	5.853 jiwa
Penyandang Cacat	959 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.320 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	2.451 RT
Miskin	6.537 RT
Hampir Miskin	6.173 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	13.450 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	14
Nama Provinsi	Riau
Kode Kabupaten	1401
Nama Kabupaten	Kuantan Singingi
Pekerja Sosial Masyarakat	75 Orang
Organisasi Sosial	52 Orsos
Karang Taruna	13 KT

7.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Kuantan Singingi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Telp. (0760) 561853, Fax. (0760) 561852 Taluk Kuantan Kode Pos 29562.

7.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009.

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 36 KUBE pada tahun 2009 dan 20 KUBE pada tahun 2007.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 95 klien di 3 panti sosial anak pada tahun 2009.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 17 orang pekerja migran pada tahun 2008.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

8. Kabupaten Sarolangun



Gambar 15
Lambang Kabupaten Sarolangun

8.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sarolangun adalah beribukota di Sarolangun dengan luas wilayah 5.166 km² berpenduduk sebanyak 200.016 jiwa dengan kepadatan 32 jiwa/km². Kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan dan 130 desa/kelurahan wilayah administratif. Kabupaten Sarolangun di Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang Hari - Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin - Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 16
Peta Lokasi Kabupaten Sarolangun

8.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	15
Nama Provinsi	Jambi
Kode Kabupaten	1503
Nama Kabupaten	Sarolangun
Balita Telantar	3.583 jiwa
Anak Telantar	15.768 jiwa
Lanjut Usia Telantar	5.297 jiwa
Penyandang Cacat	1.116 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.502 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	2.875 RT
Miskin	6.023 RT
Hampir Miskin	5.346 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	13.329 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	15
Nama Provinsi	Jambi
Kode Kabupaten	1503
Nama Kabupaten	Sarolangun
Pekerja Sosial Masyarakat	46 Orang
Organisasi Sosial	9 Orsos
Karang Taruna	92 KT

8.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kabupaten Sarolangun Jl. Lintas Sumatera KM. 4,5 Sarolangun (0745) 91381.

8.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Sarolangun antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Sarolangun antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 23 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2008. Pada tahun 2009 telah dilaksanakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) sebanyak 100 unit yang berasal dari dana UKS.

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten ini sebanyak 632 KK atau 2.446 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 375 KK (1.443 jiwa), 120 KK (585 jiwa) sedang diberdayakan dan 137 KK (418) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 209 klien di 7 panti sosial anak pada tahun 2009.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial pada tahun 2009 antara lain bantuan pembangunan ruang kelas baru SMK Assalamah 45, Simpang Rambutan, Sukajaya Pelawan, Kec. Pelawan, bantuan untuk pembangunan / rehabilitasi madrasah, rks SLTA, masjid, ponpes, TKAT , SD/madrasah sebanyak 15 buah dan bantuan untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebanyak 150 unit serta bantuan tahap ke 2 untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebanyak 100 unit.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

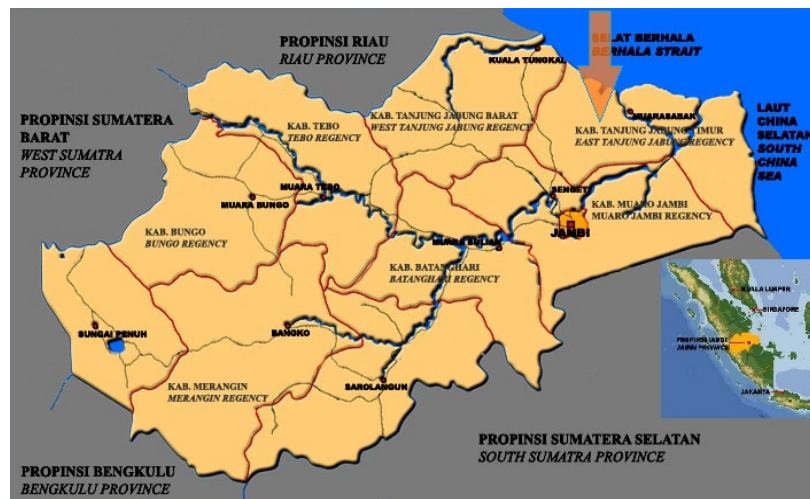
9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Gambar 17
Lambang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

9.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah beribukota di Muarasabak dengan luas wilayah 5.443 km² mempunyai penduduk sebanyak 204.391 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 6 kecamatan dan 60 desa/kelurahan. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara, Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi di sebelah barat serta Laut Cina Selatan di sebelah timur.



Gambar 18
Peta Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

9.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	15
Nama Provinsi	Jambi
Kode Kabupaten	1506
Nama Kabupaten	Tanjung Jabung Timur
Balita Telantar	3.817 jiwa
Anak Telantar	15.441 jiwa
Lanjut Usia Telantar	5.349 jiwa
Penyandang Cacat	779 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.503 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	2.838 RT
Miskin	5.858 RT
Hampir Miskin	4.730 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	12.367 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	15
Nama Provinsi	Jambi
Kode Kabupaten	1506
Nama Kabupaten	Tanjung Jabung Timur
Pekerja Sosial Masyarakat	38 Orang
Organisasi Sosial	13 Orsos
Karang Taruna	37 KT

9.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kabupaten Tanjung Jabung Timur Komp. Perkantoran Bukit Menderang Desa Rano Muara Sabak Telp. (0740) 7370051, 7370052.

9.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2009 antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2009 antara lain rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) sebanyak 500 unit yang berasal dari dana UKS.

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 232 KK atau 1.135 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 150 KK (804 jiwa) sedangkan 82 KK (331 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam pada tahun 2009 antara lain pemberian bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit dumlap.

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial pada tahun 2009 antara lain pemberian bantuan bahan bangun rumah kebakaran 142 unit.

c. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial pada tahun 2009 antara lain pemberian bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebanyak 200 unit.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

10. Kabupaten Ogan Ilir



Gambar 19
Lambang Kabupaten Ogan Ilir

10.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Ogan Ilir adalah sebuah kabupaten yang berada di jalur lintas timur Sumatera, beribukota di Indralaya dengan luas wilayah 2.666 km² mempunyai penduduk sebanyak 357.510 jiwa. Wilayah administratif kabupaten ini terdiri dari 6 kecamatan dan 245 desa/kelurahan. Kabupaten Ogan Ilir berbatasan dengan kota Palembang di bagian utara , Kabupaten Bayuasin, Kab.Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di bagian timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu di bagian selatan dan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Bayuasin di bagian barat.



Gambar 20
Peta Lokasi Kabupaten Ogan Ilir

10.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	16
Nama Provinsi	Sumatera Selatan
Kode Kabupaten	1610
Nama Kabupaten	Ogan Ilir
Balita Telantar	12.397 jiwa
Anak Telantar	56.086 jiwa
Lanjut Usia Telantar	15.367 jiwa
Penyandang Cacat	2.138 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	4.342 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	8.840 RT
Miskin	18.040 RT
Hampir Miskin	17.870 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	33.331 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	16
Nama Provinsi	Sumatera Selatan
Kode Kabupaten	1610
Nama Kabupaten	Ogan Ilir
Pekerja Sosial Masyarakat	176 Orang
Organisasi Sosial	7 Orsos
Karang Taruna	174 KT
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	15 WKSBM

10.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial kabupaten Ogan Ilir Jl. Raya Lintas Timur KM. 37 Telp. (0711) 580826, Fax. (0711) 580026 Indralaya Kode Pos 30662.

10.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2009 antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Ogan Ilir antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 20 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2007.

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 40 KK atau 191 jiwa dan semuanya belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2009 antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 130 klien di 3 panti sosial anak dan pemberian bantuan jaminan sosial penyandang cacat berat kepada 222 orang.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial pada tahun 2009 antara lain pemantapan tenaga pendamping keserasian, pembinaan bimbingan sosial dalam rangka keserasian sosial, dan bantuan keserasian sosial di 15 desa.

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 10 orang pekerja migran pada tahun 2008 dan 10 orang korban tindak kekerasan pada tahun 2009.

c. Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2009 antara lain pemberian bantuan cadangan klaim Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

11. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan



Gambar 21
Lambang Kabupaten OKU Selatan

11.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah 5.849 Km² mempunyai penduduk sebanyak 281.685 jiwa. Wilayah administratif kabupaten OKU Selatan terdiri dari 10 Kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten OKU Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung di bagian Utara; Kabupaten OKU Timur dan Provinsi Lampung di bagian Timur; Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Bengkulu di bagian Barat.



Gambar 22
Peta Lokasi Kabupaten OKU Selatan

11.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	16
Nama Provinsi	Sumatera Selatan
Kode Kabupaten	1608
Nama Kabupaten	OKU Selatan
Balita Telantar	10.324 jiwa
Anak Telantar	45.098 jiwa
Lanjut Usia Telantar	8.876 jiwa
Penyandang Cacat	1.529 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.748 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	5.349 RT
Miskin	12.765 RT
Hampir Miskin	19.411 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	34.936 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	16
Nama Provinsi	Sumatera Selatan
Kode Kabupaten	1608
Nama Kabupaten	OKU Selatan
Pekerja Sosial Masyarakat	47 Orang
Organisasi Sosial	6 Orsos
Karang Taruna	191 KT

11.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten OKU Selatan, Komplek Perkantoran Pemkab. OKU Selatan, Muaradua 32171 Telp. (0735) 482566, Fax. (0735)590770

11.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten OKU Selatan antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten OKU Selatan antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 25 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2009

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten OKU Selatan sebanyak 354 KK atau 1.618 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 65 KK (304 jiwa) sedangkan 289 KK (1.314 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 70 klien di 2 panti sosial anak pada tahun 2009.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

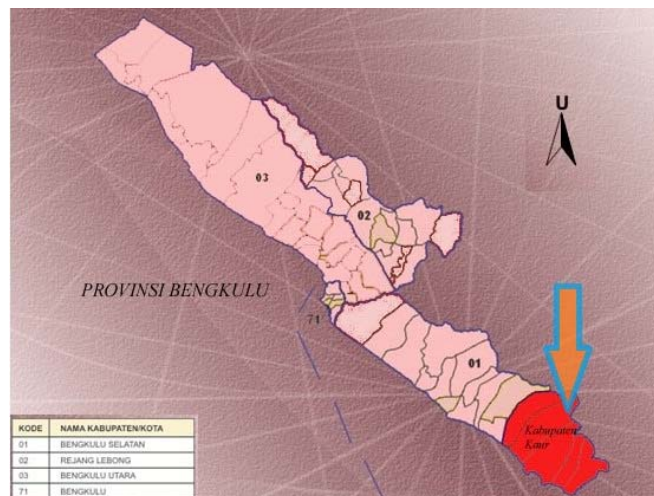
12. Kabupaten Kaur



Gambar 23
Lambang Kabupaten Kaur

12.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 2.369,05 Km² mempunyai penduduk sebanyak 110.428 jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Kaur terdiri dari 7 Kecamatan dan 122 desa/kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan di bagian Utara; Provinsi Sumatera Selatan di bagian Timur; Samudera Hindia di bagian Barat dan Provinsi Lampung di bagian Selatan.



Gambar 24
Peta Lokasi Kabupaten Bengkulu

12.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	17
Nama Provinsi	Bengkulu
Kode Kabupaten	1704
Nama Kabupaten	Kaur
Balita Telantar	3.507 jiwa
Anak Telantar	15.183 jiwa
Lanjut Usia Telantar	3.393 jiwa
Penyandang Cacat	902 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	797 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	2.078 RT
Miskin	8.091 RT
Hampir Miskin	2.016 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	11.781 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	17
Nama Provinsi	Bengkulu
Kode Kabupaten	1704
Nama Kabupaten	Kaur
Pekerja Sosial Masyarakat	50 Orang
Organisasi Sosial	7 Orsos
Karang Taruna	156 KT

12.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kaur Jl.
Perkantoran Padang Gempas telp. (0739)61330

12.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Kaur antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Kaur antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 40 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2008 dan 50 KUBE tahun 2009

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Kaur sebanyak 462 KK atau 1.484 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 359 KK (1.072 jiwa) sedangkan 103 KK (412 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 225 klien di 3 panti sosial anak dan 1 panti cacat pada tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam pada tahun 2009 adalah pemberian bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit mobil RTU.

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran adalah pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 8 orang korban tindak kekerasan dan pekerja migran pada tahun 2005.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

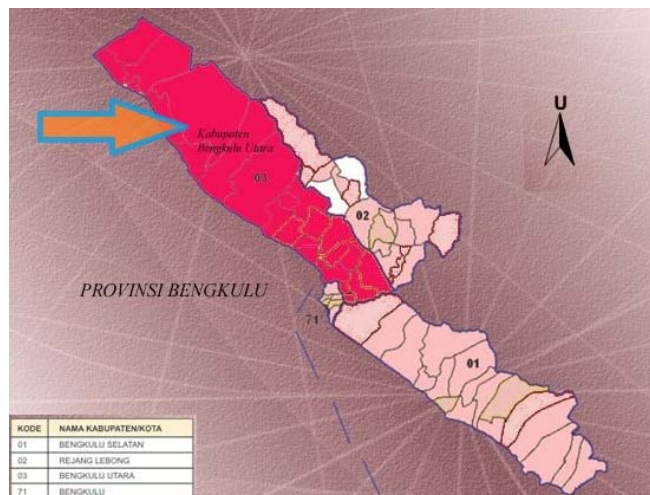
13. Kabupaten Bengkulu Utara



Gambar 25
Lambang Kabupaten Bengkulu Utara

13.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkulu Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, beribukota di Arga Makmur dengan luas wilayah 9.585,24 Km² mempunyai penduduk sebanyak 380.000 jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 22 Kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat di bagian Utara; Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Jambi di bagian Timur; Samudera Hindia di bagian Barat dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu di bagian Selatan



Gambar 26
Peta Lokasi Kabupaten Bengkulu Utara

13.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	17
Nama Provinsi	Bengkulu
Kode Kabupaten	1703
Nama Kabupaten	Bengkulu Utara
Balita Telantar	9.855 jiwa
Anak Telantar	37.609 jiwa
Lanjut Usia Telantar	11.068 jiwa
Penyandang Cacat	1.749 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	3.131 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	7.908 RT
Miskin	14.474 RT
Hampir Miskin	11.808 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	32.533 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	17
Nama Provinsi	Bengkulu
Kode Kabupaten	1703
Nama Kabupaten	Bengkulu Utara
Pekerja Sosial Masyarakat	268 Orang
Organisasi Sosial	40 Orsos
Karang Taruna	259 KT

13.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara Jl. Jend. Sudirman No. 9
Argamakmur, Telp.(0737)522798

13.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Bengkulu Utara antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Bengkulu Utara antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 40 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2006 dan 50 KUBE tahun 2009, dan RSRTLH 150 unit tahun 2009 dari APBN

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 310 KK atau 1.304 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 310 KK (1.304 jiwa)

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 105 klien di 3 panti sosial anak dan JS PACA berat 85 orang pada tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial pada tahun 2009 antara lain pemberian bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit mobil RTU.

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain pemberian bantuan UEP untuk 5 orang KTK tahun 2003, UEP KTK 13 orang tahun 2004, UEP KTK 16 orang tahun 2005, UEP KTK untuk 15 orang tahun 2007, UEP KTK 1 orang tahun 2008, UEP KTK 4 orang tahun 2009 serta pemberian bantuan UEP PM 20 orang tahun 2004, UEP PM 19

orang tahun 2005, UEP PM 15 orang tahun 2007, UEP PM 5 orang tahun 2008 dan UEP PM 5 orang tahun 2009.

c. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial antara lain pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos tahun 2009.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

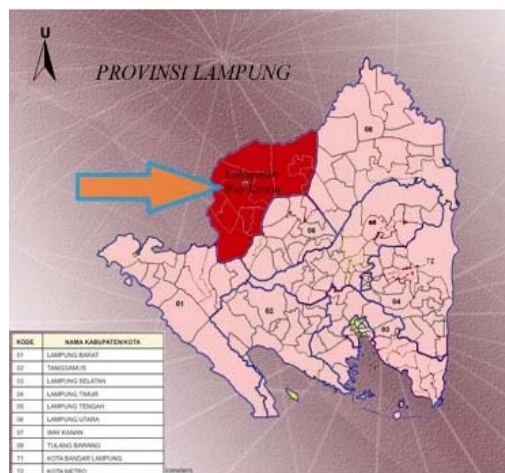
14. Kabupaten Way Kanan



Gambar 27
Lambang Kabupaten Way Kanan

14.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, beribukota di Blambangan Umpu dengan luas wilayah 3.921,63 Km² mempunyai penduduk sebanyak 386.567 jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Way Kanan terdiri dari 14 Kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di bagian Utara; Kabupaten Tulang Bawang di bagian Timur; Kabupaten Lampung Barat di bagian Barat dan Kabupaten Lampung Utara di bagian Selatan



Gambar 28
Peta Lokasi Kabupaten Way Kanan

14.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	18
Nama Provinsi	Lampung
Kode Kabupaten	1807
Nama Kabupaten	Way Kanan
Balita Telantar	13.118 jiwa
Anak Telantar	57.468 jiwa
Lanjut Usia Telantar	13.358 jiwa
Penyandang Cacat	2.116 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	3.480 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	9.579 RT
Miskin	18.045 RT
Hampir Miskin	18.132 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	44.098 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	18
Nama Provinsi	Lampung
Kode Kabupaten	1807
Nama Kabupaten	Way Kanan
Pekerja Sosial Masyarakat	201 Orang
Organisasi Sosial	19 Orsos
Karang Taruna	200 KT

14.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan
Komplek kantor Pemda Blambangan Umpu Km. 02, telp. (0723)461023, fax.
(0723)461024.

14.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2009 antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Way Kanan antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 40 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2008.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 240 klien di 10 panti sosial anak tahun 2009.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial pada tahun 2009 antara lain pemantapan tenaga pendamping keserasian sosial, pembinaan dan bimbingan sosial dalam rangka keserasian sosial serta bantuan keserasian sosial di 10 desa.

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain pemberian bantuan UEP untuk 8 orang KTK tahun 2004.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

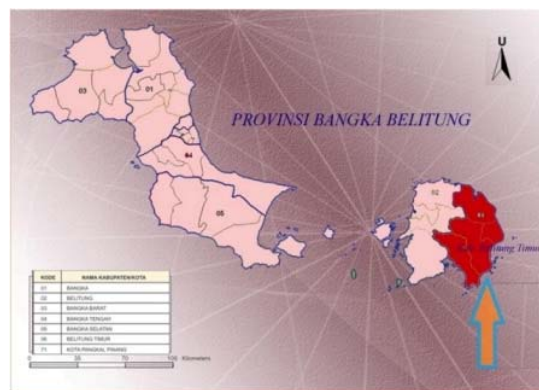
15. Kabupaten Belitung Timur



Gambar 29
Lambang Kabupaten Belitung Timur

15.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Belitung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, beribukota di Gantong dengan luas wilayah 2.550 km² mempunyai penduduk sebanyak 87.380 jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 4 Kecamatan dan 30 desa/kelurahan . Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan di bagian Utara; selat Karimata di bagian Timur; Kabupaten Belitung di bagian Barat dan Laut Jawa di bagian Selatan.



Gambar 30
Peta Lokasi Kabupaten Belitung Timur

15.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	19
Nama Provinsi	Kep. Bangka Belitung
Kode Kabupaten	1906
Nama Kabupaten	Belitung Timur
Balita Telantar	345 jiwa
Anak Telantar	1.973 jiwa
Lanjut Usia Telantar	3.074 jiwa
Penyandang Cacat	502 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	691 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	581 RT
Miskin	1.476 RT
Hampir Miskin	1.948 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	2.884

B. PSKS

Kode Provinsi	19
Nama Provinsi	Kep. Bangka Belitung
Kode Kabupaten	1906
Nama Kabupaten	Belitung Timur
Pekerja Sosial Masyarakat	39 Orang
Organisasi Sosial	2 Orsos
Karang Taruna	39 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	15 DU
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	88 WKSBM

15.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Belitung Timur, Komplek Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur, Dusun Manggarawan, Desa Padang, Manggar, Telp. (0719)91725.

15.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Belitung Timur antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Belitung Timur antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2008, dan 31 KUBE BLPS tahun 2009

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 232 KK atau 922 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 116 KK (319 jiwa), yang sedang diberdayakan sebanyak 30 KK (123 jiwa) sedangkan 86 KK (480 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 22 klien di 1 panti sosial anak, dan JS PACA berat 5 orang tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemberian bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit mobil RTU pada tahun 2009

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemberian Bantuan UEP untuk 11 orang KTK tahun 2009

c. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 adalah pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

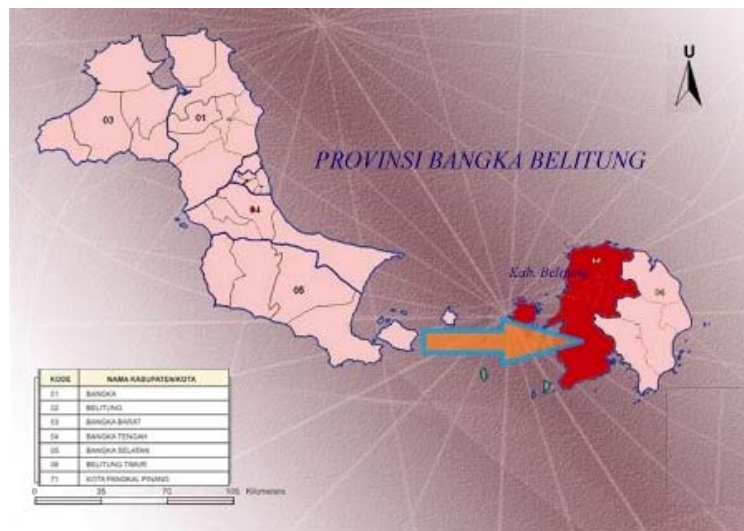
16. Kabupaten Belitung



Gambar 31
Lambang Kabupaten Belitung

16.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Belitung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, beribukota di Tanjung Pandan dengan luas wilayah 4.800 Km² mempunyai penduduk sebanyak 204.776 jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Belitung terdiri dari 5 Kecamatan dan 12 Desa/Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan di bagian Utara; Selat Karimata di bagian Timur; Laut Jawa di bagian Barat dan Selat Gaspar di bagian Selatan



Gambar 32
Peta Lokasi Kabupaten Belitung

16.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	19
Nama Provinsi	Kep. Bangka Belitung
Kode Kabupaten	1902
Nama Kabupaten	Belitung
Balita Telantar	601 jiwa
Anak Telantar	3.647 jiwa
Lanjut Usia Telantar	3.486 jiwa
Penyandang Cacat	510 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	894 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.003 RT
Miskin	1.433 RT
Hampir Miskin	2.871 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	3.403 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	19
Nama Provinsi	Kep. Bangka Belitung
Kode Kabupaten	1902
Nama Kabupaten	Belitung
Pekerja Sosial Masyarakat	22 Orang
Organisasi Sosial	6 Orsos
Karang Taruna	48 KT

16.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Belitung Jl. Jend. A. Yani No. 100 Tanjung Pandan, Telp. (0719)21355, Fax. (0719)23628.

16.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Belitung antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Belitung antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2009

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Belitung sebanyak 228 KK atau 812 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 228 KK (812 jiwa)

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 110 klien di 4 panti sosial anak, dan JS PACA berat 5 orang tahun 2009.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemberian bantuan UEP untuk 11 orang KTK tahun 2008, UEP untuk 11 orang KTK tahun 2009.

b. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

17. Kabupaten Karimun



Gambar 33
Lambang Kabupaten Karimun

17.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, beribukota di Tanjung Balai dengan luas wilayah 7.984 Km² mempunyai penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 9 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Kabupaten Karimun terdiri dari 198 Pulau dengan 67 diantaranya telah berpenghuni. Kabupaten ini berbatasan dengan Philip Channel (Singapore Strait), Semenanjung Malaysia dan Selat Malaka di bagian Utara; Pulau Batam di bagian Timur; Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan di bagian Barat dan Kabupaten Indragiri Hilir di bagian Selatan.



Gambar 34
Peta Lokasi Kabupaten Karimun

17.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	21
Nama Provinsi	Kepulauan Riau
Kode Kabupaten	2101
Nama Kabupaten	Karimun
Balita Telantar	3.074 jiwa
Anak Telantar	14.555 jiwa
Lanjut Usia Telantar	4.047 jiwa
Penyandang Cacat	932 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.491 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.596 RT
Miskin	3.191 RT
Hampir Miskin	6.917 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	8.875 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	21
Nama Provinsi	Kepulauan Riau
Kode Kabupaten	2101
Nama Kabupaten	Karimun
Pekerja Sosial Masyarakat	16 Orang
Organisasi Sosial	6 Orsos
Karang Taruna	50 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	14 DU
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	4 WKSBM

17.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial dan Pemakaman Tanjung Balai Kabupaten Karimun Alamat :
Jl. Canggai Putri Karimun, Telp./Fax. (0777)326294/7366112.

17.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Karimun antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Karimun antara lain pemberian Bantuan pembangunan RSRTLH 102 unit tahun 2008 dari APBN

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Karimun sebanyak 700 KK atau 2.635 jiwa, belum diberdayakan sebanyak 700 KK (2.635 jiwa)

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 70 klien di 2 panti sosial anak tahun 2009.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos bagi 400 pekerja sektor informal melalui 2 lembaga pelaksana Askesos.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penelitian tentang masalah kebutuhan dan sumber daya sosial tertinggal dan atau perbatasan pada tahun 2009.

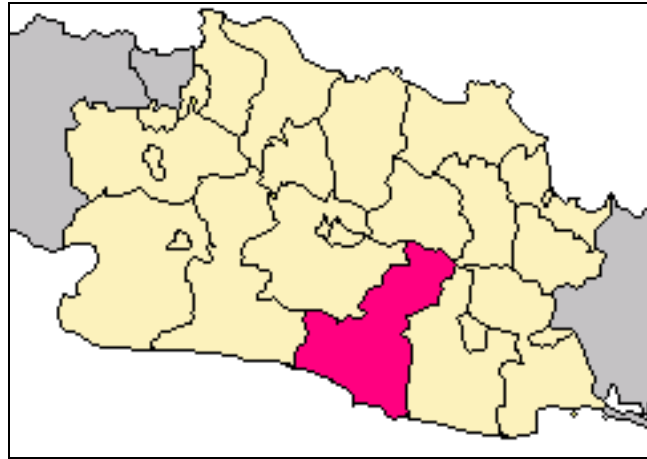
18. Kabupaten Garut



Gambar 35
Lambang Kabupaten Garut

18.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, beribukota di Garut dengan luas wilayah 3.065,19 Km² mempunyai penduduk sebanyak 2.260.000 (2003) jiwa dengan kepadatan 737 Jiwa/km². Wilayah administratif Kabupaten Garut terdiri dari 42 Kecamatan, 420 Desa, dan 19 Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang di bagian Utara; Kabupaten Tasikmalaya di bagian Timur; Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur di bagian Barat dan Samudera Indonesia di bagian Selatan



Gambar 36
Peta Lokasi Kabupaten Garut

18.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	32
Nama Provinsi	Jawa Barat
Kode Kabupaten	3205
Nama Kabupaten	Garut
Balita Telantar	68.674 jiwa
Anak Telantar	303.450 jiwa
Lanjut Usia Telantar	83.401 jiwa
Penyandang Cacat	8.047 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	24.283 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	34.334 RT
Miskin	78.367 RT
Hampir Miskin	108.309 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	62.759 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	32
Nama Provinsi	Jawa Barat
Kode Kabupaten	3205
Nama Kabupaten	Garut

Pekerja Sosial Masyarakat	141 Orang
Organisasi Sosial	162 Orsos
Karang Taruna	161 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	37 DU
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	7 WKSBM

18.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Garut Jl. Patriot
14 Tarogong Garut, Telp. (0262)232727/233134

18.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. *Direktorat Pemberdayaan Keluarga*

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Garut antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. *Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin*

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Garut antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 37 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2007 dan 50 KUBE BLPS tahun 2009

c. *Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)*

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Garut sebanyak 91 KK atau 400 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 91 KK (400 jiwa)

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 870 klien di 29 panti sosial anak, 2 PSTW, dan 2 panti cacat tahun 2009; JSLU 72 orang tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. *Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial*

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 adalah Pemantapan tenaga pendamping keserasian, pembinaan bimbingan

sosial dalam rangka keserasian sosial dan pemberian bantuan keserasian sosial di 15 desa

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 adalah Bantuan tangap darurat penanggulangan bencana gempa bumi pada september 2009 berupa lauk-pauk 500 paket, biskuit 150 roll, sandang 200 paket, selimut 500 lembar, kidware 300 paket, famili kit 300 paket, diserahkan ke dinas sosial kabupaten Garut.

c. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemberian bantuan UEP untuk 30 orang PM tahun 2009.

d. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemberian bantuan pengobatan an. Endang & Luki penderita polio, kp. hayurea RT 02/05 Karang Sari, Pangatikan kabupaten Garut., bantuan sosial untuk kegiatan pembinaan bagi masyarakat prasejahtera berupa home industri sparepart pompa air dan kompor gas oleh yayasan al-falah al musri majasari kec. cibiuk kabupaten Garut, bantuan sosial untuk kelompok tani ternak sapi suka negara sabahi mancagahar pameungpeuk kabupaten Garut.

e. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 16.734 RTSM di 14 kec, 97 desa.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kajian tentang pengembangan desa berketahanan sosial pada tahun 2008.

b. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penelitian tentang masalah kebutuhan dan sumber daya sosial tertinggal dan atau perbatasan pada tahun 2009.

19. Kabupaten Sukabumi



Gambar 37
Lambang Kabupaten Sukabumi

19.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sukabumi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, beribukota di Pelabuhanratu dengan luas wilayah 3.934,47 Km² mempunyai penduduk sebanyak 2.210.000 (2003) jiwa dengan kepadatan 562 Jiwa/km². Wilayah administratif Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 Kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor di bagian Utara; Kabupaten Cianjur di bagian Timur; Kabupaten Lebak di bagian Barat dan Samudera Hindia di bagian Selatan



Gambar 38
Peta Lokasi Kabupaten Sukabumi

19.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	32
Nama Provinsi	Jawa Barat
Kode Kabupaten	3202
Nama Kabupaten	Sukabumi
Balita Telantar	53.868 jiwa
Anak Telantar	253.055 jiwa
Lanjut Usia Telantar	92.197 jiwa
Penyandang Cacat	8.987 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	24.366 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	40.916 RT
Miskin	75.974 RT
Hampir Miskin	107.356 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	185.373 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	32
Nama Provinsi	Jawa Barat
Kode Kabupaten	3202
Nama Kabupaten	Sukabumi
Pekerja Sosial Masyarakat	651 Orang
Organisasi Sosial	165 Orsos
Karang Taruna	347 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	259 DU

19.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sukabumi Jl. Siliwangi No. 143 Cibadak Telp. (0266)537511/434246

19.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Sukabumi antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Sukabumi sebanyak 607 KK atau 2.696 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 607 KK (2.696 jiwa)

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 844 klien di 32 panti sosial anak, 3 panti cacat, dan 1 panti napza tahun 2009; JS PACA berat 8 orang tahun 2009; JSLU 91 orang tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemberian bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit mobil RTU pada tahun 2009.

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemberian Bantuan UEP untuk 50 orang KTK tahun 2008

c. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 adalah pemberian bantuan pembangunan gedung pertemuan & sekretariat tenaga penyuluh sosial terampil cikakak kabupaten Sukabumi.

d. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 adalah Bantuan PKH bagi 13.912 RTSM di 8 kec, 20 desa.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain kajian tentang pengembangan desa berketahanan sosial pada tahun 2008.

b. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

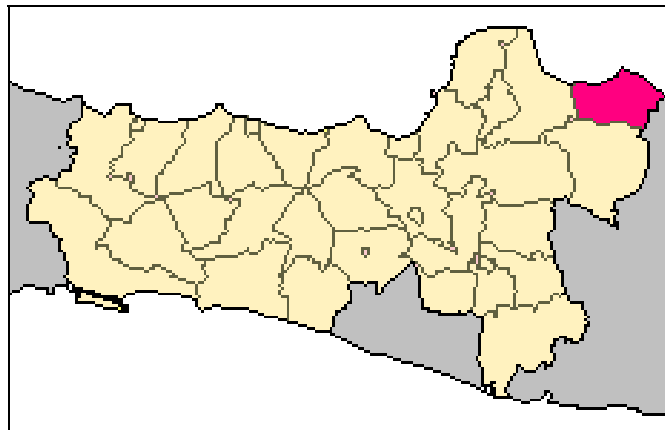
20. Kabupaten Rembang



Gambar 39
Lambang Kabupaten Rembang

20.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Rembang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, beribukota di Rembang dengan luas wilayah 1.014,10 Km² mempunyai penduduk sebanyak 577.000 (2003) jiwa dengan kepadatan 569 Jiwa/km². Wilayah administratif Kabupaten Rembang terdiri dari 14 Kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di bagian Utara; Kabupaten Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di bagian Timur; Kabupaten Pati di bagian Barat dan Kabupaten Blora di bagian Selatan



Gambar 40
Peta Lokasi Kabupaten Rembang

20.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	33
Nama Provinsi	Jawa Tengah
Kode Kabupaten	3317
Nama Kabupaten	Rembang
Balita Telantar	13.153 jiwa
Anak Telantar	60.698 jiwa
Lanjut Usia Telantar	30.010 jiwa
Penyandang Cacat	4.035 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	7.839 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	11.640 RT
Miskin	31.748 RT
Hampir Miskin	26.986 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	34.165 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	33
Nama Provinsi	Jawa Tengah
Kode Kabupaten	3317
Nama Kabupaten	Rembang
Pekerja Sosial Masyarakat	1.334 Orang
Organisasi Sosial	11 Orsos
Karang Taruna	294 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	13 DU
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	8 WKSBM

20.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang Jl.
Pemuda Km.3 Rembang, Tlp. (0295)691349

20.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Rembang antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Rembang tahun 2007 antara lain pemberian Bantuanpem

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 305 klien di 5 panti sosial anak, 1 panti lansia, dan 1 panti cacat tahun 2009; JS PACA berat 17 orang tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Bantuan UEP untuk 40 orang PM tahun 2009

b. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Bantuan pengembangan & pemberdayaan koperasi ponpes & pembangunan gedung pondok pesantren sebanyak 3 buah kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

c. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2007.

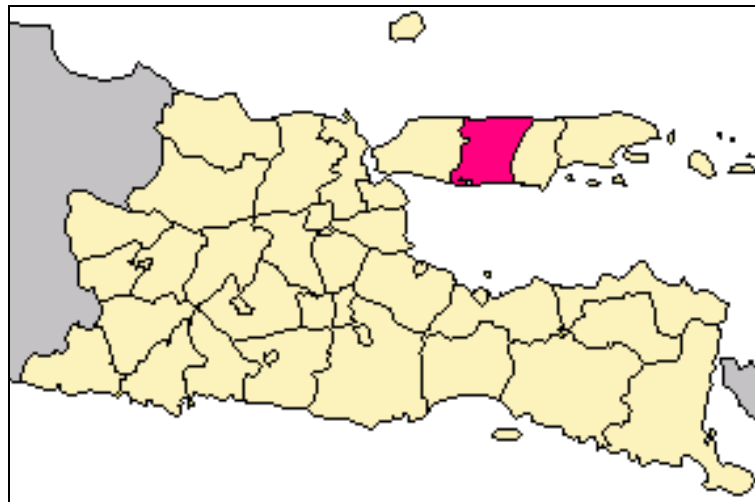
21. Kabupaten Sampang



Gambar 41
Lambang Kabupaten Sampang

21.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sampang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.233,30 Km² mempunyai penduduk sebanyak 794.914 (2005) jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Sampang terdiri dari 12 Kecamatan, 180 Desa dan 6 Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian Utara; Kabupaten Pamekasan di bagian Timur; Kabupaten Bangkalan di bagian Barat dan Selat Madura di bagian Selatan



Gambar 42
Peta Lokasi Kabupaten Sampang

21.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	35
Nama Provinsi	Jawa Timur
Kode Kabupaten	3527
Nama Kabupaten	Sampang
Balita Telantar	23.378 jiwa
Anak Telantar	164.526 jiwa
Lanjut Usia Telantar	49.671 jiwa
Penyandang Cacat	6.463 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	19.457 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	21.103 RT
Miskin	73.870 RT
Hampir Miskin	55.413 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	130.451 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	35
Nama Provinsi	Jawa Timur
Kode Kabupaten	3527
Nama Kabupaten	Sampang
Pekerja Sosial Masyarakat	743 Orang
Organisasi Sosial	1.384 Orsos
Karang Taruna	1.813 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	137 DU
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	2.356 WKSMBM

21.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang Jl. Rajawali
No. 7 Rembang Telp. (0323)321164

21.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Sampang antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Sampang antara lain pemberian Bantuan RSRTLH 187 unit tahun 2008 dari APBN

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 560 klien di 28 panti sosial anak tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Bantuan PKH bagi 7.352 RTSM di 4 kecamatan.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2007.

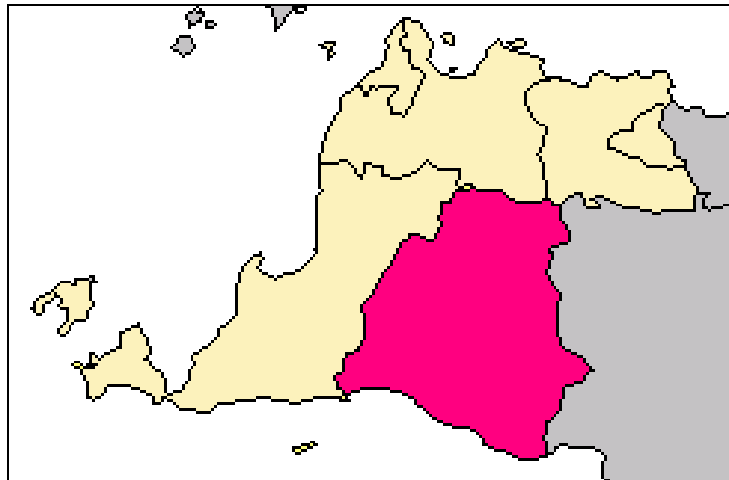
22. Kabupaten Lebak



Gambar 43
Lambang Kabupaten Lebak

22.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten beribukota di Rangkasbitung dengan luas wilayah 3.044,72 Km² mempunyai penduduk sebanyak 1,176.350 (2005) jiwa dengan kepadatan 391 Jiwa/km². Wilayah administratif Kabupaten Lebak terdiri dari 28 Kecamatan, 315 Desa dan 2 Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di bagian Utara; Provinsi Jawa Barat di bagian Timur; Kabupaten Pandeglang di bagian Barat dan Samudra Hindia di bagian Selatan.



Gambar 44
Peta Lokasi Kabupaten Lebak

22.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	36
Nama Provinsi	Banten
Kode Kabupaten	3602
Nama Kabupaten	Lebak
Balita Telantar	41.294 jiwa
Anak Telantar	218.551 jiwa
Lanjut Usia Telantar	42.507 jiwa
Penyandang Cacat	5.881 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	15.722 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	20.418 RT
Miskin	55.415 RT
Hampir Miskin	75.371 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	138.075 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	36
Nama Provinsi	Banten
Kode Kabupaten	3.602
Nama Kabupaten	Lebak
Pekerja Sosial Masyarakat	1.306 Orang
Organisasi Sosial	139 Orsos
Karang Taruna	300 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	4 DU
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	40 WKSBM

22.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak Jl. Siliwangi No. 12 Pasir Ona, Rangkasbitung, Lebak Telp./Fax. (0252)280906

22.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Lebak antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Lebak antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 40 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2008

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Lebak sebanyak 2.071 KK atau 9.859 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 2.071 KK (9.859 jiwa)

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 1365 klien di 50 panti sosial anak tahun 2009; JS PACA berat 93 orang tahun 2009; JSLU 80 orang tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemberian bantuan UEP untuk 20 orang KTK tahun 2006

b. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos sebesar Rp. 30.000.000,- bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos. Rencana tahun 2010 Kab Lebak akan mendapat bantuan PKH untuk kurang lebih 18.554 RTSM di 27 kecamatan.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2007.

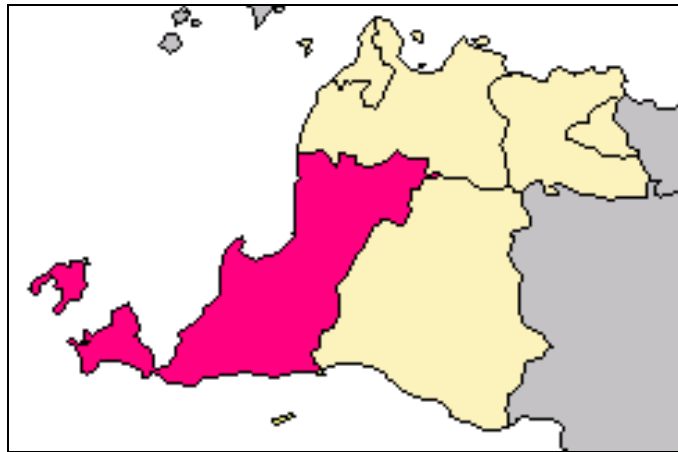
23. Kabupaten Pandeglang



Gambar 45
Lambang Kabupaten Pandeglang

23.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pandeglang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten beribukota di Pandeglang dengan luas wilayah 2.747 Km² mempunyai penduduk sebanyak 1,585.000 (2008) jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 Kecamatan, 335 Desa/Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di bagian Utara; Kabupaten Lebak di bagian Timur; Samudra Indonesia di bagian Barat dan Selatan. Situs web resmi: <http://www.pandeglangkab.go.id> atau <http://www.pandeglangkab.info>



Gambar 46
Peta Lokasi Kabupaten Pandeglang

23.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	36
Nama Provinsi	Banten
Kode Kabupaten	3601
Nama Kabupaten	Pandeglang
Balita Telantar	41.396 jiwa
Anak Telantar	190.515 jiwa
Lanjut Usia Telantar	37.756 jiwa
Penyandang Cacat	5.144 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	13.715 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	22.826 RT
Miskin	30.881 RT
Hampir Miskin	73.611 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	115.800 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	36
Nama Provinsi	Banten
Kode Kabupaten	3601
Nama Kabupaten	Pandeglang
Pekerja Sosial Masyarakat	1.675 Orang
Organisasi Sosial	115 Orsos
Karang Taruna	335 KT
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	15 WKSBM

23.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang Jl. Raya Serang Km.
3,5 Pandeglang 42251 Telp./Fax. (0253)201296.

23.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Pandeglang antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Pandeglang antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 20 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2007

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 715 klien di 27 panti sosial anak, 2 panti cacat dan 1 panti lansia tahun 2009; JS PACA berat 153 orang tahun 2009; JSLU 80 orang tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit mobil RTU

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Bantuan UEP untuk 20 orang KTK tahun 2006

c. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Bantuan sosial untuk perguruan islam manlu pusat menses kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Rp. 50.000.000

d. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 17.474 RTSM sebesar di 10 kecamatan dan pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos sebesar Rp. 30.000.000,- bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2007.

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penelitian tentang masalah kebutuhan dan sumber daya sosial tertinggal dan atau perbatasan pada tahun 2009.

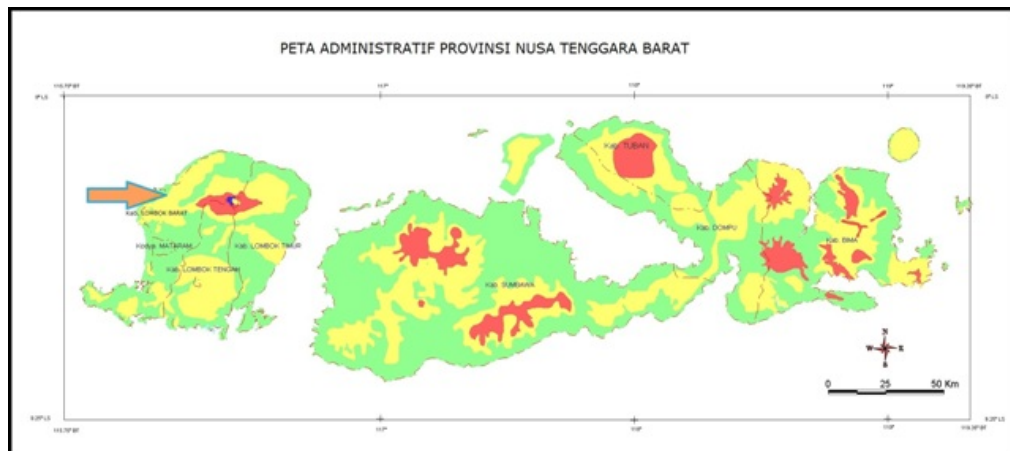
24. Kabupaten Lombok Barat



Gambar 47
Lambang Kabupaten Lombok Barat

24.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat beribukota di Gerung dengan luas wilayah 21.729 Ha mempunyai penduduk sebanyak 709.076 (2003) jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 15 Kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian Utara; Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur di bagian Timur; Selat Lombok dan Kota Mataram di bagian Barat dan Samudra Indonesia di Bagian Selatan



Gambar 48
Peta Lokasi Kabupaten Lombok Barat

24.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	52
Nama Provinsi	Nusa Tenggara Barat
Kode Kabupaten	5201
Nama Kabupaten	Lombok Barat
Balita Telantar	31.231 jiwa
Anak Telantar	137.316 jiwa
Lanjut Usia Telantar	32.833 jiwa
Penyandang Cacat	5.785 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	16.001 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	20.862 RT
Miskin	56.187 RT
Hampir Miskin	44.311 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	90.843 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	52
Nama Provinsi	Nusa Tenggara Barat
Kode Kabupaten	5201
Nama Kabupaten	Lombok Barat
Pekerja Sosial Masyarakat	263 Orang
Organisasi Sosial	130 Orsos
Karang Taruna	42 KT
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	11 WKSBM

24.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat Jl. Sukarno Hatta, Gerung Telp. (0370)681150.

24.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Lombok Barat antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Lombok Barat antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 25 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2008

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 949 KK atau 4.125 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 280 KK (1.141 jiwa) sedangkan 669 KK (2.984 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 760 klien di 31 panti sosial anak, 1 panti cacat tahun 2009; JS PACA berat 261 orang tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Bantuan Sosial antara lain :

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Bantuan UEP untuk 20 orang KTK tahun 2005, 5 orang KTK tahun 2007, 10 orang KTK tahun 2008 dan 30 orang KTK tahun 2009 dan Bantuan UEP untuk 40 orang PM tahun 2005, 20 orang PM tahun 2006, 30 orang PM tahun 2007, 85 orang PM tahun 2008 dan 25 orang PM tahun 2009

b. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos sebesar bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain kajian tentang pemetaan pranata sosial pada komunitas lokal pada tahun 2007, kajian tentang pengembangan desa berketahanan sosial pada tahun 2009, dan kajian tentang tipologi desa tansos berdasarkan indikator ketahanan sosial masyarakat pada tahun 2009.

b. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penelitian tentang masalah kebutuhan dan sumber daya sosial tertinggal dan atau perbatasan pada tahun 2009.

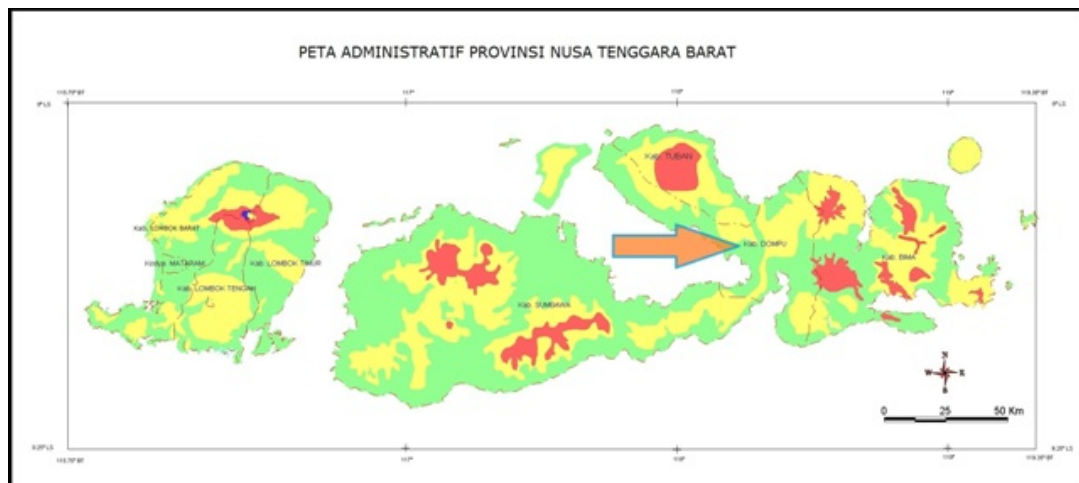
25. Kabupaten Dompu



Gambar 49
Lambang Kabupaten Dompu

25.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Dompu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat beribukota di Dompu dengan luas wilayah 2.324,55 Km² mempunyai penduduk sebanyak 180.672 (2000) jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Dompu terdiri dari 8 Kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bima dan Laut Flores di bagian Utara; Kabupaten Bima di bagian Timur; Kabupaten Sumbawa di bagian Barat dan Samudra Indonesia di Bagian Selatan



Gambar 50
Peta Lokasi Kabupaten Dompu

25.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	52
Nama Provinsi	Nusa Tenggara Barat
Kode Kabupaten	5205
Nama Kabupaten	Dompu
Balita Telantar	11.748 jiwa
Anak Telantar	41.149 jiwa
Lanjut Usia Telantar	6.042 jiwa
Penyandang Cacat	1.563 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.401 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	4.655 RT
Miskin	11.902 RT
Hampir Miskin	10.279 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	21.830 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	52
Nama Provinsi	Nusa Tenggara Barat
Kode Kabupaten	5205
Nama Kabupaten	Dompu
Pekerja Sosial Masyarakat	312 Orang

25.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu Jl. Mahoni
No. 32 Telp. (0373)210443

25.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Dompu antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Dompu antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 38 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2009

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Dompu sebanyak 46 KK atau 139 jiwa dan yang sedang diberdayakan sebanyak 46 KK (139 jiwa).

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 325 klien di 15 panti sosial anak, 1 panti cacat tahun 2009; JS PACA berat 8 orang tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2009 adalah pemberian bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit dumlap

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2009 adalah pemberian bantuan UEP untuk 5 orang KTK tahun 2006, 10 orang KTK tahun 2007, 15 orang KTK tahun 2008, dan 10 orang KTK tahun 2009. Bantuan UEP untuk 20 orang PM tahun 2005, 10 orang PM tahun 2006, 10 orang PM tahun 2007, 20 orang PM tahun 2008 dan 5 orang PM tahun 2009.

c. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2009 adalah pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 4.706 RTSM di 4 kecamatan, pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos sebesar bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

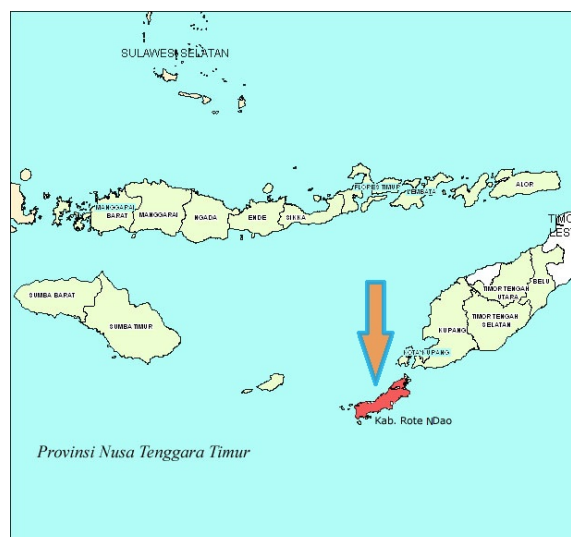
26. Kabupaten Rote Ndao



Gambar 51
Lambang Kabupaten Rote Ndao

26.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Rote Ndao adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur beribukota di Baa dengan luas wilayah 1.731 Km² mempunyai penduduk sebanyak 76.352 jiwa (2000). Wilayah administratif Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 9 Kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Sawu dan Teluk Ungga di bagian Utara; Tanjung Pukuwafu dan Laut Timor di bagian Timur; Laut Sawu di bagian Barat dan Samudra Hindia di Bagian Selatan



Gambar 52
Peta Lokasi Kabupaten Rote Ndao

26.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	53
Nama Provinsi	Nusa Tenggara Timur
Kode Kabupaten	5314
Nama Kabupaten	Rote Ndao
Balita Telantar	9.815 jiwa
Anak Telantar	30.769 jiwa
Lanjut Usia Telantar	7.353 jiwa
Penyandang Cacat	1.710 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.017 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	3.799 RT
Miskin	10.100 RT
Hampir Miskin	5.529 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	17.963 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	53
Nama Provinsi	Nusa Tenggara Timur
Kode Kabupaten	5314
Nama Kabupaten	Rote Ndao
Pekerja Sosial Masyarakat	400 Orang
Organisasi Sosial	4 Orsos
Karang Taruna	80 KT

26.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Bagian Sosial Sekretariat Daerah

26.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Rote Ndao antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Rote Ndao antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 43 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2009

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 26 klien di 1 panti sosial anak tahun 2009.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

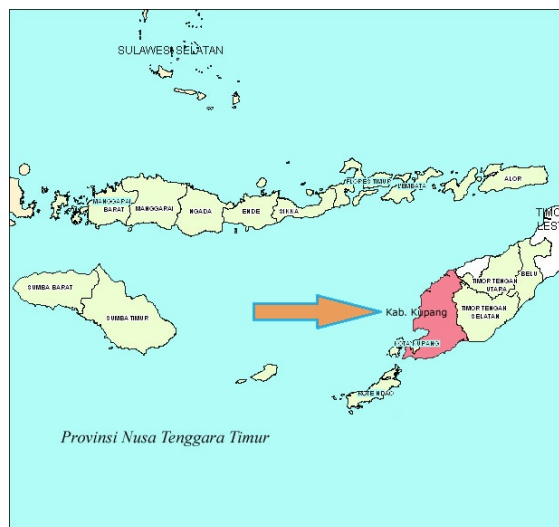
27. Kabupaten Kupang



Gambar 53
Lambang Kabupaten Kupang

27.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kupang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur beribukota di Kupang dengan luas wilayah 53.178,28 Km² mempunyai penduduk sebanyak 328.733 jiwa (2004). Wilayah administratif Kabupaten Kupang terdiri dari 22 Kecamatan, 164 Desa dan 22 Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Sawu di bagian Utara; Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Negara Timor Leste di bagian Timur; Laut Sawu di bagian Barat dan Samudra Hindia di Bagian Selatan. Situs web resmi: www.kab-kupang.go.id



Gambar 54
Peta Lokasi Kabupaten Kupang

27.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	53
Nama Provinsi	Nusa Tenggara Timur
Kode Kabupaten	5303
Nama Kabupaten	Kupang
Balita Telantar	30.265 jiwa
Anak Telantar	100.122 jiwa
Lanjut Usia Telantar	18.255 jiwa
Penyandang Cacat	4.862 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	4.209 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	13.632 RT
Miskin	20.607 RT
Hampir Miskin	20.363 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	50.926 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	61
Nama Provinsi	Kalimantan Barat
Kode Kabupaten	6103
Nama Kabupaten	Landak
Pekerja Sosial Masyarakat	2.748 Orang
Organisasi Sosial	2 Orsos

27.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kupang Alamat : Jl. Cak Doko No. 4 Kupang Telp. (0380)82251

27.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Kupang antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Kupang antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 20 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2007

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Kupang sebanyak 1.518 KK atau 5.334 jiwa, belum diberdayakan sebanyak 1.518 KK (5.334 jiwa)

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 370 klien di 11 panti sosial anak, 1 panti cacat, 2 panti lansia tahun 2009; JSLU 66 orang tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 antara lain pemantapan tenaga pendamping keserasian, pembinaan bimbingan sosial dalam rangka keserasian sosial, dan pemberian bantuan keserasian sosial sebesar di 7 desa.

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan penguatan Orsos tahun 2009.

c. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 adaah pemberian bantuan tambahan pekerjaan pembangunan masjid Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Naibonat Kupang.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

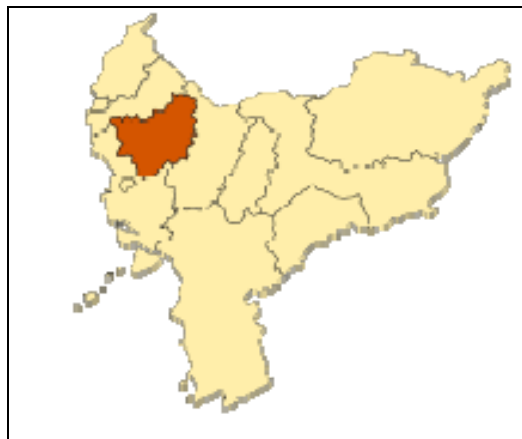
28. Kabupaten Landak



Gambar 55
Lambang Kabupaten Landak

28.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Landak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat beribukota di Ngabang dengan luas wilayah 9.909,10 Km² mempunyai penduduk sebanyak 282.026 jiwa (2004). Wilayah administratif Kabupaten Landak terdiri dari 10 Kecamatan, 174 Desa/Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang di bagian Utara; Kabupaten Sanggau di bagian Timur; Kabupaten Pontianak di bagian Barat dan Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau di Bagian Selatan. Situs web resmi: www.landak.go.id



Gambar 56
Peta Lokasi Kabupaten Landak

28.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	61
Nama Provinsi	Kalimantan Barat
Kode Kabupaten	6103
Nama Kabupaten	Landak
Balita Telantar	15.819 jiwa
Anak Telantar	73.391 jiwa
Lanjut Usia Telantar	10.844 jiwa
Penyandang Cacat	3.808 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.309 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	9.013 RT
Miskin	14.243 RT
Hampir Miskin	20.881 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	42.566 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	61
Nama Provinsi	Kalimantan Barat
Kode Kabupaten	6103
Nama Kabupaten	Landak
Pekerja Sosial Masyarakat	2.748 Orang
Organisasi Sosial	2 Orsos
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	780 WKSMBM

28.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak Jl. Afandi Rani Komp.
Bali Permai No. 1 Telp. (0563)21554/21836

28.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Landak antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Landak sebanyak 1.096 KK atau 4.245 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 846 KK (3.665 jiwa), sedangkan 250 KK (580 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 65 klien di 3 panti sosial anak tahun 2009

C. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

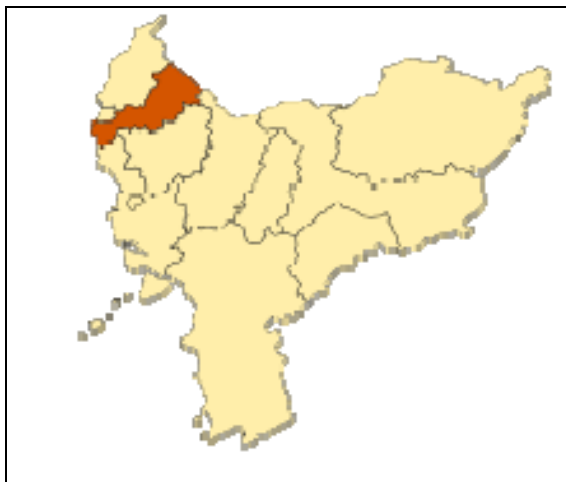
29. Kabupaten Bengkayang



Gambar 57
Lambang Kabupaten Bengkayang

29.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkayang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat beribukota di Bengkayang dengan luas wilayah 5.897 Km² mempunyai penduduk sebanyak 336.477 jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 Kecamatan, 2 Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sambas di bagian Utara; Kabupaten Sanggau dan Serawak Malaysia di bagian Timur; Laut Natuna dan Kota Singkawang di bagian Barat dan Kabupaten Landak dan Kota Pontianak di Bagian Selatan. Situs web resmi: <http://www.bengkayangkab.go.id/>



Gambar 58
Peta Lokasi Kabupaten Bengkayang

29.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	61
Nama Provinsi	Kalimantan Barat
Kode Kabupaten	6102
Nama Kabupaten	Bengkayang
Balita Telantar	7.011 jiwa
Anak Telantar	29.036 jiwa
Lanjut Usia Telantar	4.404 jiwa
Penyandang Cacat	1.248 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.392 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	2.346 RT
Miskin	4.985 RT
Hampir Miskin	10.113 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	16.915 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	61
Nama Provinsi	Kalimantan Barat
Kode Kabupaten	6102
Nama Kabupaten	Bengkayang
Pekerja Sosial Masyarakat	1.083 Orang
Organisasi Sosial	4 Orsos
Karang Taruna	254 KT
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	450 WKSBM

29.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang
Alamat : Jl. Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang Telp. (0562) 441808/
441641/ 79212

29.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Bengkayang antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Bengkayang antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 20 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2007

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Bengkayang sebanyak 1.952 KK atau 9.816 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 375 KK (1.916 jiwa), sedangkan 1.577 KK (7.900 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

30. Kabupaten Katingan



Gambar 59
Lambang Kabupaten Katingan

30.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Katingan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah beribukota di Kasongan dengan luas wilayah 17.800 Km² mempunyai penduduk sebanyak 125.207 jiwa (2004). Wilayah administratif Kabupaten Katingan terdiri dari 17 Kecamatan, 2 Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sintang di bagian Utara; Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kota Palangkaraya di bagian Timur; Kabupaten Kotawaringin Timur di bagian Barat dan Laut Jawa di Bagian Selatan



Gambar 60
Peta Lokasi Kabupaten Katingan

30.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	62
Nama Provinsi	Kalimantan Tengah
Kode Kabupaten	6209
Nama Kabupaten	Katingan
Balita Telantar	2.181 jiwa
Anak Telantar	10.672 jiwa
Lanjut Usia Telantar	3.701 jiwa
Penyandang Cacat	1.175 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	837 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.706 RT
Miskin	3.069 RT
Hampir Miskin	4.793 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	8.305 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	62
Nama Provinsi	Kalimantan Tengah
Kode Kabupaten	6209
Nama Kabupaten	Katingan
Pekerja Sosial Masyarakat	15 Orang
Organisasi Sosial	6 Orsos
Karang Taruna	3 KT

30.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan Jl.
Pemda Komp. Kereng Humbang Kasongan Telp. 4041999.

30.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Katingan antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Katingan antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 20 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2007

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Katingan sebanyak 165 KK atau 825 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 165 KK (825 jiwa).

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 25 klien di 1 panti sosial anak tahun 2009

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Bantuan Sosial antara lain :

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Bantuan UEP untuk 50 orang KTK tahun 2005, Bantuan UEP untuk 50 orang PM tahun 2005

31. Kabupaten Pulang Pisau



Gambar 61
Lambang Kabupaten Pulang Pisau

31.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah beribukota di Pulang Pisang dengan luas wilayah 8.977 Km² mempunyai penduduk sebanyak 111.488 jiwa (2000). Wilayah administratif Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 Kecamatan, 83 Desa dan 1 Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas di bagian Utara; Kabupaten Kapuas di bagian Timur; Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya di bagian Barat dan Laut Jawa di Bagian Selatan.



Gambar 62
Peta Lokasi Kabupaten Pulang Pisau

31.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	62
Nama Provinsi	Kalimantan Tengah
Kode Kabupaten	6210
Nama Kabupaten	Pulang Pisau
Balita Telantar	3.736 jiwa
Anak Telantar	16.198 jiwa
Lanjut Usia Telantar	4.632 jiwa
Penyandang Cacat	840 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	914 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.654 RT
Miskin	2.543 RT
Hampir Miskin	7.341 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	10.447 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	62
Nama Provinsi	Kalimantan Tengah
Kode Kabupaten	6210
Nama Kabupaten	Pulang Pisau
Pekerja Sosial Masyarakat	79 Orang
Organisasi Sosial	15 Orsos
Karang Taruna	76 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha	32 DU
Kesejahteraan Sosial	
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	49 WKSBM

31.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau Alamat : Jl. Pemda No. 007 Pulang Pisau Telp./Fax. (0513)61371

31.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Pulang Pisau antara lain penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Pulang Pisau antara lain pemberian Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 44 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2008

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Pulang Pisang sebanyak 160 KK atau 790 jiwa, belum diberdayakan sebanyak 160 KK (790 jiwa)

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2009 belum ada

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Bantuan Sosial antara lain :

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit mobil RTU

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Bantuan UEP untuk 50 orang KTK tahun 2008, Bantuan UEP untuk 60 orang PM tahun 2009

d. Direktorat Jaminan dan Kesejahteraan Sosial

Pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos sebesar bagi 200 pekerja sektor informal melalui lembaga pelaksana Askesos.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain kajian tentang replikasi model desa berketahanan sosial melalui pemberdayaan pranata sosial tahun 2007, dan kajian tentang pemetaan pranata sosial pada komunitas lokal pada tahun 2009, serta kajian tentang tipologi desa tansos berdasarkan indikator ketahanan sosial masyarakat pada tahun 2009.

32. Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 63
Lambang Kabupaten Hulu Sungai Utara

32.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 892,7 km² atau 2,38 % dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak ±300.000 jiwa. Secara umum kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur. Situs web resmi: www.hulusungaiutara.go.id



Gambar 64
Peta Lokasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

32.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	63
Nama Provinsi	Kalimantan Selatan
Kode Kabupaten	6308
Nama Kabupaten	Hulu Sungai Utara
Balita Telantar	2.663 jiwa
Anak Telantar	14.231 jiwa
Lanjut Usia Telantar	6.440 jiwa
Penyandang Cacat	1.439 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	3.072 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	2.021 RT
Miskin	5.563 RT
Hampir Miskin	6.281 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	11.334 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	63
Nama Provinsi	Kalimantan Selatan
Kode Kabupaten	6304
Nama Kabupaten	Barito Kuala
Pekerja Sosial Masyarakat	567 Orang
Organisasi Sosial	14 Orsos
Karang Taruna	192 KT
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	3 WKSBM

32.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Hulu Sungai Utara, Jl. Karya manuntung Telp. (0527) 61623.

32.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.

Pembinaan 40 Kelompok Usaha Bersama BPLS pada tahun 2008

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 510 klien di 9 panti sosial anak dan 1 Panti Sosial Penyandang Cacat , serta Jaminan Sosial Lanjut Usia untuk 70 orang pada tahun 2009.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 12 orang Pekerja Migran tahun 2007.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

33. Kabupaten Barito Kuala



Gambar 65
Lambang Kabupaten Barito Kuala

33.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.284 km² dan berpenduduk sebanyak 245.914 jiwa (2000). Kabupaten Barito Kuala merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Situs web resmi: www.baritokualakab.go.id.



Gambar 66
Peta Lokasi Kabupaten Barito Kuala

33.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	63
Nama Provinsi	Kalimantan Selatan
Kode Kabupaten	6304
Nama Kabupaten	Barito Kuala
Balita Telantar	4.921 jiwa
Anak Telantar	20.063 jiwa
Lanjut Usia Telantar	6.838 jiwa
Penyandang Cacat	1.398 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.605 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	3.119 RT
Miskin	7.794 RT
Hampir Miskin	7.333 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	16.870 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	63
Nama Provinsi	Kalimantan Selatan
Kode Kabupaten	6304
Nama Kabupaten	Barito Kuala
Pekerja Sosial Masyarakat	567 orang
Organisasi Sosial	14 Orsos
Karang Taruna	192 KT
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	3 WKSBM

33.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kab. Barito Kuala, Jl. Sukmaraga No. 38A Telp. (0511) 4799051 Marabahan.

33.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Pembinaan 20 Kelompok Usaha Bersama BPLS pada tahun 2007

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 180 klien di 4 panti sosial anak dan Jaminan Sosial Lanjut Usia untuk 62 orang.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam antara lain bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit perahu evakuasi

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 10 orang KTK tahun 2006.

c. Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial antara lain Bantuan PKH bagi 3.321 Rumah Tangga Sangat Miskin.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

34. Kabupaten Malinau



Gambar 67
Lambang Kabupaten Malinau

34.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Malinau adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Malinau. Kabupaten Malinau juga sering disebut Bumi Tengyuan. Luasnya adalah 42.620 km² dengan jumlah Penduduk sebanyak 36.279 jiwa (2006). Di kabupaten ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang dengan luas 1.360.050,00 Ha. Situs web resmi: www.malinaukab.go.id



Gambar 68
Peta Lokasi Kabupaten Malinau

34.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	64
Nama Provinsi	Kalimantan Timur
Kode Kabupaten	6406
Nama Kabupaten	Malinau
Balita Telantar	3.110 jiwa
Anak Telantar	12.518 jiwa
Lanjut Usia Telantar	1.964 jiwa
Penyandang Cacat	361 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	528 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.297 RT
Miskin	2.254 RT
Hampir Miskin	4.158 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	6.581 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	64
Nama Provinsi	Kalimantan Timur
Kode Kabupaten	6406
Nama Kabupaten	Malinau
Pekerja Sosial Masyarakat	25 Orang
Organisasi Sosial	15 Orsos
Karang Taruna	30 KT

34.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malinau, Jl. Pusat Perkantoran Malinau Telp. (0553) 21223.

34.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.

Pembinaan 20 Kelompok Usaha Bersama BPLS pada tahun 2007

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Malinau sebanyak 662 KK atau 2.161 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 320 KK (1.178 jiwa), sedangkan 342 KK (983 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 195 klien di 5 panti sosial anak.

35. Kabupaten Nunukan



Gambar 69
Lambang Kabupaten Nunukan

35.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 109.527 jiwa (2004). Motto Kabupaten Nunukan adalah "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari bahasa suku Tidung. Nunukan juga adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Situs web resmi: www.nunukankaltim.go.id.



Gambar 70
Peta Lokasi Kabupaten Nunukan

35.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	64
Nama Provinsi	Kalimantan Timur
Kode Kabupaten	6408
Nama Kabupaten	Nunukan
Balita Telantar	5.489 jiwa
Anak Telantar	21.446 jiwa
Lanjut Usia Telantar	2.818 jiwa
Penyandang Cacat	687 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	867 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.951 RT
Miskin	6.417 RT
Hampir Miskin	4.286 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	10.414 RT

35.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nunukan, Jl. Pelabuhan Baru No.22 Telp. (0556) 22564 Nunukan.

35.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.

Pada tahun 2006 Direktorat pemberdayaan Fakir Miskin melaksanakan kegiatan pemberdayaan fakir miskin di daerah terpencil dan perbatasan antar negara dengan memberikan bantuan kepada 35 kelompok usaha bersama (KUBE) atau sebanyak 350 orang dan bantuan bahan bangunan rumah bagi 150 KK.

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Nunukan sebanyak 1.079 KK atau 4.534 jiwa, sedang diberdayakan

sebanyak 156 KK (796 jiwa), sedangkan 923 KK (3.738 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk 150 klien di 3 Panti Sosial Sosial Anak.

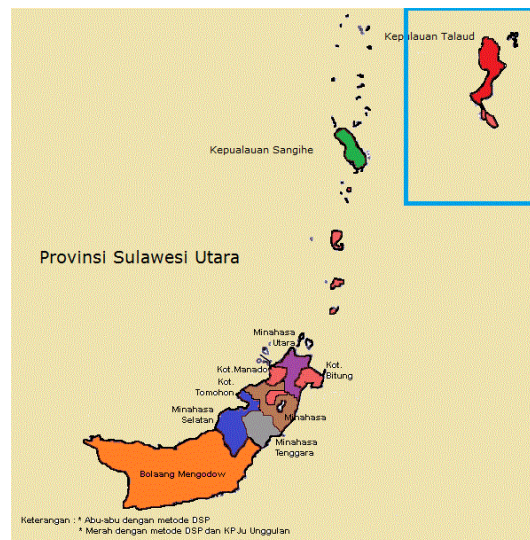
36. Kabupaten Kepulauan Talaud



Gambar 71
Lambang Kabupaten Talaud

36.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan ibu kota: Melonguane. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000. Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi. Wilayah ini adalah kawasan paling utara Indonesia, berbatasan dengan Filipina di sebelah utara. Jumlah Penduduk: 91.067 Jiwa. Situs : www.talaudkab.go.id



Gambar 72
Peta Lokasi Kabupaten Talaud

36.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	71
Nama Provinsi	Sulawesi Utara
Kode Kabupaten	7104
Nama Kabupaten	Kepulauan Talaud
Balita Telantar	3.467 jiwa
Anak Telantar	14.140 jiwa
Lanjut Usia Telantar	3.832 jiwa
Penyandang Cacat	726 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	491 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.484 RT
Miskin	4.763 RT
Hampir Miskin	4.855 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	10.062 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	71
Nama Provinsi	Sulawesi Utara
Kode Kabupaten	7104
Nama Kabupaten	Kepulauan Talaud
Pekerja Sosial Masyarakat	8 Orang
Organisasi Sosial	40 Orsos
Karang Taruna	2 KT

36.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kab Kep. Talaud, Kel. Meluangane Kec. Melonguane.

36.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Pada tahun 2006 Direktorat pemberdayaan Fakir Miskin melaksanakan kegiatan pemberdayaan fakir miskin di daerah terpencil dan perbatasan antar negara dengan memberikan bantuan kepada 35 kelompok usaha bersama (KUBE) atau sebanyak 350 orang dan bantuan bahan bangunan rumah bagi 148 KK.

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Kep. Talaud sebanyak 428 KK atau 2.106 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 40 KK (160 jiwa), sedang diberdayakan sebanyak 90 KK (250 jiwa), sedangkan 298 KK (1.696 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam antara lain bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit mobil Rescue Tactical Unit (RTU).

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial antara lain pemantapan tenaga pendamping keserasian di 9 desa, pembinaan bimbingan sosial dalam rangka keserasian sosial di 9 desa, dan bantuan keserasian sosial di 9 desa

c. *Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial*

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial antara lain bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.000 unit rumah, bantuan sosial untuk dukungan sembako 1500 paket pada pemberdayaan wilayah pertahanan melalui operasi terpadu bhakti TNI Lanal tahun 2009 di pulau-pulau terluar Sulawesi Utara. Bantuan Sosial untuk dukungan 2 buah kapal motor penumpang di kawasan Kab. Talaud Prov. Sulawesi Utara (perbatasan Indonesia - Filipina) oleh Korem 131/Santiago.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. *Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat*

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain kajian tentang pengembangan masyarakat di Miangas pada tahun 2008.

b. *Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial*

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

c. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*

Kegiatan yang telah dilaksanakan Puslitbang Kesos adalah penelitian tentang masalah kebutuhan dan sumber daya sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Pulau Miangas, Talaud pada tahun 2008.

37. Kabupaten Kepulauan Sangihe

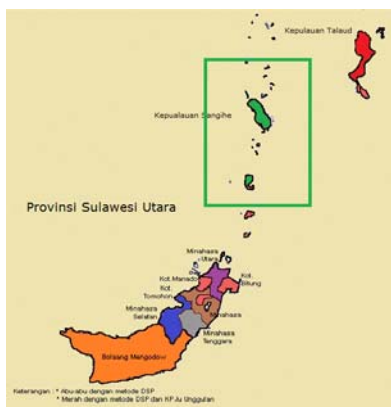


Gambar 73
Lambang Kabupaten Sangihe

37.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000. Ibu kota kabupaten ini adalah Tahuna. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.012,94 km² dan berpenduduk sebanyak 129.609 (2008).

Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Filipina), serta berada di bibir Samudera Pasifik. Wilayah kabupaten ini meliputi 3 klaster, yaitu Klaster Tatoareng, Klaster Sangihe, dan Klaster Perbatasan. Situs web resmi: <http://www.sangihe.go.id/>



Gambar 74
Peta Lokasi Kabupaten Sangihe

37.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	71
Nama Provinsi	Sulawesi Utara
Kode Kabupaten	7103
Nama Kabupaten	Kepulauan Sangihe
Balita Telantar	3.185 jiwa
Anak Telantar	14.153 jiwa
Lanjut Usia Telantar	5.092 jiwa
Penyandang Cacat	951 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	961 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	2.012 RT
Miskin	5.752 RT
Hampir Miskin	4.800 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	9.759 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	71
Nama Provinsi	Sulawesi Utara
Kode Kabupaten	7103
Nama Kabupaten	Kepulauan Sangihe
Pekerja Sosial Masyarakat	8 Orang
Organisasi Sosial	100 Orsos
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	1 DU

37.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Kep. Sangihe, Jl. Baru Tona Tahuna Telp. (0432) 21429.

37.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Rehabilitasi Sosial Rumah Tangga Tak Layak Huni sejumlah 500 Unit pada tahun 2009 dan Pembentukan 38 KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) pada tahun 2009

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Kep. Sangihe sebanyak 1.250 KK atau 4.956 jiwa, sedang diberdayakan sebanyak 158 KK (445 jiwa), sedangkan 1.092 KK (1.696 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain Tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 68 klien di 3 Panti Sosial Anak.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam antara lain bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit mobil RTU.

b. Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial antara lain Pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos bagi 400 pekerja sektor informal melalui 2 lembaga pelaksana Askesos

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

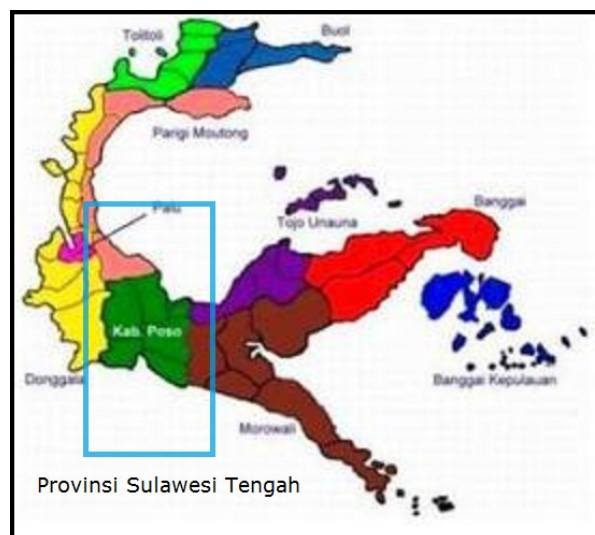
38. Kabupaten Poso



Gambar 75
Lambang Kabupaten Poso

38.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Poso adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 24.197 km² dan berpenduduk sebanyak 132.032 jiwa (2000). Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Poso.



Gambar 76
Peta Lokasi Kabupaten Poso

38.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	72
Nama Provinsi	Sulawesi Tengah
Kode Kabupaten	7204
Nama Kabupaten	Poso
Balita Telantar	5.798 jiwa
Anak Telantar	19.989 jiwa
Lanjut Usia Telantar	5.077 jiwa
Penyandang Cacat	1.148 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.139 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	2.119 RT
Miskin	7.273 RT
Hampir Miskin	5.361 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	10.153 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	72
Nama Provinsi	Sulawesi Tengah
Kode Kabupaten	7204
Nama Kabupaten	Poso
Pekerja Sosial Masyarakat	544 Orang
Organisasi Sosial	12 Orsos
Karang Taruna	141 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	7 DU

38.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kab. Poso, Jl. P.Kalimantan No. 44 Poso Telp. (0452) 21437.

38.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Pembentukan 20 KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) pada tahun 2007

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Poso sebanyak 71 KK atau 357 jiwa, semuanya sudah diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain Tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 340 klien di 14 Panti Sosial Anak, dan Jaminan Sosial PACA Berat untuk 137 orang.

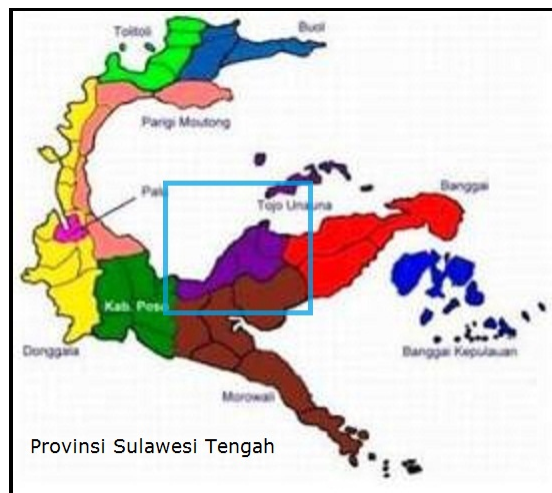
39. Kabupaten Tojo Una-Una



Gambar 77
Lambang Kabupaten Tojo Una-Una

39.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tojo Una-una adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ampana. Semula kabupaten ini masuk dalam wilayah Kabupaten Poso namun berdasar pada UU no.32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.726 km² dan berpenduduk sebanyak 99.866 jiwa (2000). Situs: <http://ekbangtounakab.org>



Gambar 78
Peta Lokasi Kabupaten Tojo Una-Una

39.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	72
Nama Provinsi	Sulawesi Tengah
Kode Kabupaten	7209
Nama Kabupaten	Tojo Una-Una
Balita Telantar	5.309 jiwa
Anak Telantar	17.868 jiwa
Lanjut Usia Telantar	2.911 jiwa
Penyandang Cacat	686 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.003 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.944 RT
Miskin	5.340 RT
Hampir Miskin	4.338 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	10.406

B. PSKS

Kode Provinsi	72
Nama Provinsi	Sulawesi Tengah
Kode Kabupaten	7209
Nama Kabupaten	Tojo Una-Una
Pekerja Sosial Masyarakat	150 Orang
Organisasi Sosial	2 Orsos
Karang Taruna	102 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	7 DU

39.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kab. Tojo Una una, Jl. Sultan Hasanuddin Ampana Telp. (0462) 21833.

39.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Tojo Una Una sebanyak 914 KK atau 3.771 jiwa. Sudah diberdayakan sebanyak 305 KK (1.136 Jiwa) sedang diberdayakan sebanyak 120 KK (420 jiwa), dan 489 KK (2.215 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain Tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 45 klien di 2 Panti Sosial Anak, dan Jaminan Sosial PACA Berat untuk 24 orang.

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial antara lain pemantapan tenaga pendamping keserasian di 5 desa, pembinaan bimbingan sosial dalam rangka keserasian sosial di 5 desa dan bantuan keserasian sosial di 5 desa.

40. Kabupaten Jeneponto



Gambar 79
Lambang Kabupaten Jeneponto

40.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km² dan berpenduduk sebanyak 330.735 jiwa, kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 s/d 1400 m, bagian tengah 100 s/d 500 m dan pada bagian selatan 0 s/d 150 m diatas permukaan laut. Situs web resmi: <http://www.jenepontokab.go.id/>



Gambar 80
Peta Lokasi Kabupaten Jeneponto

40.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	73
Nama Provinsi	Sulawesi Selatan
Kode Kabupaten	7304
Nama Kabupaten	Jeneponto
Balita Telantar	14.730 jiwa
Anak Telantar	61.304 jiwa
Lanjut Usia Telantar	15.281 jiwa
Penyandang Cacat	2.768 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	4.500 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	6.796 RT
Miskin	18.441 RT
Hampir Miskin	17.384 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	30.761 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	73
Nama Provinsi	Sulawesi Selatan
Kode Kabupaten	7304
Nama Kabupaten	Jeneponto
Pekerja Sosial Masyarakat	200 Orang
Organisasi Sosial	43 Orsos
Karang Taruna	113 KT
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	2 WKSBM

40.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Kantor sosial Kab. Jeneponto, Jl. Abd Jalil Sikki No. 15 Romanga Jeneponto
Telp. (0419) 21928.

40.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Pembentukan 33 KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) pada tahun 2009

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain Tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 1.215 klien di 36 Panti Sosial Anak, dan 2 Panti Sosial Penyandang Cacat.

C. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

41. Kabupaten Luwu



Gambar 81
Lambang Kabupaten Luwu

41.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu **Kabupaten Luwu**, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.098,97 km², sebelum Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km. Situs web resmi: www.luwu.go.id.



Gambar 82
Peta Lokasi Kabupaten Luwu

41.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	73
Nama Provinsi	Sulawesi Selatan
Kode Kabupaten	7317
Nama Kabupaten	Luwu
Balita Telantar	14.611 jiwa
Anak Telantar	58.427 jiwa
Lanjut Usia Telantar	9.664 jiwa
Penyandang Cacat	2.940 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	4.159 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	32.276 RT
Miskin	RT
Hampir Miskin	RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	28.986 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	73
Nama Provinsi	Sulawesi Selatan
Kode Kabupaten	7317
Nama Kabupaten	Luwu
Pekerja Sosial Masyarakat	222 Orang
Organisasi Sosial	19 Orsos
Karang Taruna	192 KT

41.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kab. Luwu, Jl. Jend. Sudirman - Belopa.

41.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

- a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga*
Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin*
Pembentukan 33 KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) pada tahun 2009
- c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*
Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Luwu sebanyak 1.170 KK atau 4.108 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 100 KK (450 jiwa), sedang diberdayakan sebanyak 255 KK (633 jiwa), sedangkan 815 KK (3.025 jiwa) belum diberdayakan.

B. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

- a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial*
Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

42. Kabupaten Buton



Gambar 83
Lambang Kabupaten Buton

42.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Buton adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasar Wajo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.488.71 km² (sebelum pemekaran 6.463 km²) dan pada tahun 2004 berpenduduk sebanyak 265.724 jiwa (sebelum pemekaran 533.931 jiwa). Kabupaten Buton terkenal sebagai penghasil aspal. Situs web resmi: <http://www.sultra.go.id>.



Gambar 84
Peta Lokasi Kabupaten Buton

42.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	74
Nama Provinsi	Sulawesi Tenggara
Kode Kabupaten	7401
Nama Kabupaten	Buton
Balita Telantar	18.660 jiwa
Anak Telantar	71.250 jiwa
Lanjut Usia Telantar	14.541 jiwa
Penyandang Cacat	3.748 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	4.861 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	7.903 RT
Miskin	13.779 RT
Hampir Miskin	17.373 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	33.672 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	74
Nama Provinsi	Sulawesi Tenggara
Kode Kabupaten	7401
Nama Kabupaten	Buton
Pekerja Sosial Masyarakat	83 Orang
Organisasi Sosial	8 Orsos
Karang Taruna	77 KT

42.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kab. Buton, Jl. Beloambari No. 27
Telp. (0402) 21205, 21289.

42.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Pembentukan 40 KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) pada tahun 2008

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Buton sebanyak 797 KK atau 3.070 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 220 KK (955 jiwa), sedangkan 577 KK (2.115 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial antara lain, pemantapan tenaga pendamping keserasian di 10 desa pembinaan dan bimbingan sosial, dalam rangka keserasian sosial di 10 desa dan bantuan keserasian sosial di 10 desa.

b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 40 orang Pekerja Migran tahun 2008, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 40 orang KTK dan 40 orang Pekerja Migran tahun 2009

43. Kabupaten Konawe



Gambar 85
Lambang Kabupaten Konawe

43.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Unaaha. Dulu kabupaten ini bernama Kabupaten Kendari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 443.911 (2000). Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras provinsi Sulawesi Tenggara. Separuh produksi beras provinsi tersebut berasal dari Kabupaten Konawe. Situs web resmi: www.konawe.go.id.



Gambar 86
Peta Lokasi Kabupaten Konawe

43.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	74
Nama Provinsi	Sulawesi Tenggara
Kode Kabupaten	7403
Nama Kabupaten	Konawe
Balita Telantar	16.354 jiwa
Anak Telantar	54.740 jiwa
Lanjut Usia Telantar	7.250 jiwa
Penyandang Cacat	1.864 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.596 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	5.621 RT
Miskin	12.819 RT
Hampir Miskin	13.732 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	26.754 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	74
Nama Provinsi	Sulawesi Tenggara
Kode Kabupaten	7403
Nama Kabupaten	Konawe
Pekerja Sosial Masyarakat	275 Orang
Organisasi Sosial	13 Orsos
Karang Taruna	371 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	3 DU
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	6 WKSBM

43.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Konawe, Komp Perkantoran Jl. Inolobungadue No. 407 Telp. (0408) 21351 - Unaaha.

43.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

- a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga*
Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin*
Pembentukan 50 KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) pada tahun 2008
- c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*
Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Konawe sebanyak 1.937 KK atau 8.079 jiwa, sudah diberdayakan sebanyak 961 KK (4.148 jiwa), sedangkan 976 KK (3.931 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

- a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam*
Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam antara lain bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit dumlap
- b. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial*
Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial antara lain pemantapan tenaga pendamping keserasian di 31 desa, pembinaan bimbingan sosial dalam rangka keserasian sosial di 31 desa, dan bantuan keserasian sosial di 31 desa.
- c. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran*
Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 7 orang KTK tahun 2009

d. Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial antara lain Pemberian bantuan cadangan dana klaim Askesos, bagi 400 pekerja sektor informal melalui 2 lembaga pelaksana Askesos

44. Kabupaten Boalemo



Gambar 87
Lambang Kabupaten Boalemo

44.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Boalemo dengan ibu kota, Tilamuta, merupakan kabupaten baru, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 1999. Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Menurut data terakhir yang diperoleh dari BPS Provinsi Gorontalo, Juli 2003, jumlah penduduk Kabupaten Boalemo adalah 104.758 jiwa. Wilayah Kabupaten Boalemo sendiri memiliki total luas 2.517,36 km². Situs web resmi: <http://www.boalemokab.go.id/>



Gambar 88
Peta Lokasi Kabupaten Boalemo

44.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	75
Nama Provinsi	Gorontalo
Kode Kabupaten	7501
Nama Kabupaten	Boalemo
Balita Telantar	6.044 jiwa
Anak Telantar	21.008 jiwa
Lanjut Usia Telantar	2.763 jiwa
Penyandang Cacat	806 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	920 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	2.537 RT
Miskin	5.851 RT
Hampir Miskin	4.518 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	10.761 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	75
Nama Provinsi	Gorontalo
Kode Kabupaten	7501
Nama Kabupaten	Boalemo
Organisasi Sosial	2 orsos
Karang Taruna	4 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha	55 DU
Kesejahteraan Sosial	

44.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Kantor Sosial dan Pemberdayaan Sosial Kab. Boalemo, Jl. Merdeka
Tilamuta Telp.(0433) 211022.

44.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Pembentukan 36 KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) pada tahun 2008

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Boalemo sebanyak 403 KK atau 1.226 jiwa, sedang diberdayakan sebanyak 75 KK (198 jiwa), sedangkan 328 KK (1.028 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial antara lain

C. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 10 orang KTK TAHUN 2007, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 6 orang KTK tahun 2009.

D. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2008.

45. Kabupaten Mamasa



Gambar 89
Lambang Kabupaten Mamasa

45.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mamasa, sekitar 252 km dari Kota Makassar, dapat ditempuh sekitar 6 jam dengan menggunakan mobil dari kota Pare-Pare, pusat kawasan pengembangan ekonomi terpadu di propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 275.923 km². Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa sebanyak 125.088 orang yang terdiri dari laki-laki 62,132 orang dan perempuan 62,956 orang.



Gambar 90
Peta Lokasi Kabupaten Mamasa

45.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	76
Nama Provinsi	Sulawesi Barat
Kode Kabupaten	7603
Nama Kabupaten	Mamasa
Balita Telantar	9.262 jiwa
Anak Telantar	38.358 jiwa
Lanjut Usia Telantar	5.624 jiwa
Penyandang Cacat	1.498 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.448 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	5.576 RT
Miskin	6.739 RT
Hampir Miskin	8.840 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	20.205 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	76
Nama Provinsi	Sulawesi Barat
Kode Kabupaten	7603
Nama Kabupaten	Mamasa
Pekerja Sosial Masyarakat	30 Orang
Organisasi Sosial	38 Orsos
Karang Taruna	150 KT

45.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Mamasa ,
Jl. Demmatande (Kantor Gabungan Dinas-dinas) Telp./Fax. (0411) 401251.

45.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009

b. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamasa sebanyak 214 KK atau 1.712 jiwa, semuanya belum diberdayakan

B. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin Kesos adalah Pendataan Penyandang Cacat berdasarkan klasifikasi *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) pada tahun 2009.

46. Kabupaten Seram Bagian Timur



Gambar 91
Lambang Kabupaten Seram Bagian Timur

46.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Seram Bagian Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Terdiri atas 4 kecamatan dan 54 desa. Ibukota kabupaten ini menurut UU tersebut terletak di Dataran Hunimoa, akan tetapi pusat kegiatan termasuk pemerintahan sementara berlangsung di Bula. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 15.889,92 km² dan berpenduduk sebanyak 127.271 jiwa (2000).



Gambar 92
Peta Lokasi Seram Bagian Timur

46.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	81
Nama Provinsi	Maluku
Kode Kabupaten	8107
Nama Kabupaten	Seram Bagian Timur
Balita Telantar	6.146 jiwa
Anak Telantar	24.144 jiwa
Lanjut Usia Telantar	2.487 jiwa
Penyandang Cacat	427 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.115 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.956 RT
Miskin	6.445 RT
Hampir Miskin	4.003 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	11.726 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	81
Nama Provinsi	Maluku
Kode Kabupaten	8107
Nama Kabupaten	Seram Bagian Timur
Pekerja Sosial Masyarakat	40 Orang

46.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kab Seram Bag Timur, Telp. (0915) 21162-21455 Fax.
(0915) 21511, 21338, 21004 Bula.

46.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.

Pembinaan 45 Kelompok Usaha Bersama BPLS pada tahun 2007 dan 30 KUBE pada tahun 2008.

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 439 KK atau 1.519 jiwa. Semuanya belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam antara lain bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana 1 unit mobil rtu, dan 1 unit perahu dolphin

47. Kabupaten Maluku Tenggara Barat



Gambar 93
Lambang Kabupaten Maluku Tenggara Barat

47.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Saumlaki. Luas wilayahnya adalah 124,1 km² dengan jumlah penduduk sebesar 149.790 jiwa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Pada tahun 2008, sebagian wilayah kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya.



Gambar 94
Peta Lokasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat

47.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	81
Nama Provinsi	Maluku
Kode Kabupaten	8101
Nama Kabupaten	Maluku Tenggara Barat
Balita Telantar	12.142 jiwa
Anak Telantar	41.913 jiwa
Lanjut Usia Telantar	7.920 jiwa
Penyandang Cacat	1.763 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.166 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	5.822 RT
Miskin	10.232 RT
Hampir Miskin	5.526 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	19.508 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	81
Nama Provinsi	Maluku
Kode Kabupaten	8101
Nama Kabupaten	Maluku Tenggara Barat
Pekerja Sosial Masyarakat	40 Orang
Organisasi Sosial	1 Orsos

47.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Maluku Tenggara Barat, Telp. (0918) 21142 Fax. Via Wartel (0918) 21108 - Soumlaki.

47.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Pembinaan 45 Kelompok Usaha Bersama BPLS pada tahun 2007

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 809 KK atau 3.932 jiwa, sedang diberdayakan sebanyak 144 KK (665 jiwa), sedangkan 665 KK (3.267 jiwa) belum diberdayakan

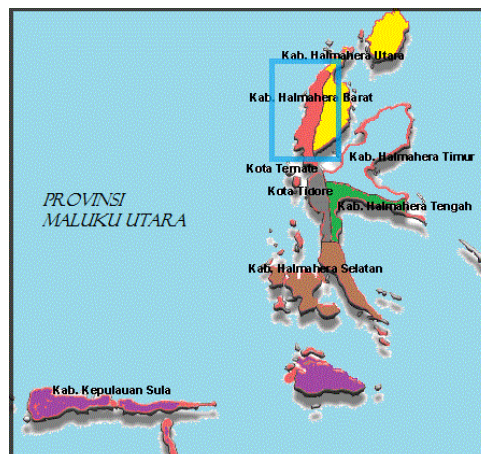
48. Kabupaten Halmahera Barat



Gambar 95
Lambang Kabupaten Halmahera Barat

48.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Jailolo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.755 km² dan berpenduduk sebanyak 94.644 jiwa (2004). Sejumlah tersebut laki-laki 48.979 jiwa dan perempuan 45.666 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten ini 10.34 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara yang 910.656, (Situs web resmi: <http://halbarkab.go.id/>)



Gambar 96
Peta Lokasi Kabupaten Halmahera Barat

48.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	82
Nama Provinsi	Maluku Utara
Kode Kabupaten	8201
Nama Kabupaten	Halmahera Barat
Balita Telantar	4.989 jiwa
Anak Telantar	17.823 jiwa
Lanjut Usia Telantar	2.814 jiwa
Penyandang Cacat	793 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	772 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.641 RT
Miskin	4.931 RT
Hampir Miskin	4.315 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	8.826 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	82
Nama Provinsi	Maluku Utara
Kode Kabupaten	8201
Nama Kabupaten	Halmahera Barat
Pekerja Sosial Masyarakat	161 Orang
Organisasi Sosial	363 Orsos
Karang Taruna	63 KT

48.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, Jl. Jati Desa Porniti Kec. Jailolo Telp. (0922) 21247 Fax. (0922) 21641.

48.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Pembinaan 25 Kelompok Usaha Bersama BPLS pada tahun 2006 dan 48 KUBE di tahun 2008.

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 1.521 KK atau 5.392 jiwa. Sudah diberdayakan sebanyak 47 KK (175 jiwa), sedang diberdayakan sebanyak 244 KK (858 jiwa), sedangkan 1230 KK (4.359 jiwa) belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial antara lain pemantapan tenaga pendamping keserasian di 10 desa, pembinaan bimbingan sosial dalam rangka keserasian sosial di 10 desa, dan bantuan keserasian sosial di 10 desa.

C. Kegiatan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan

a. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain kajian tentang revitalisasi nilai-nilai kelembagaan sosial budaya pada masyarakat pasca konflik pada tahun 2007.

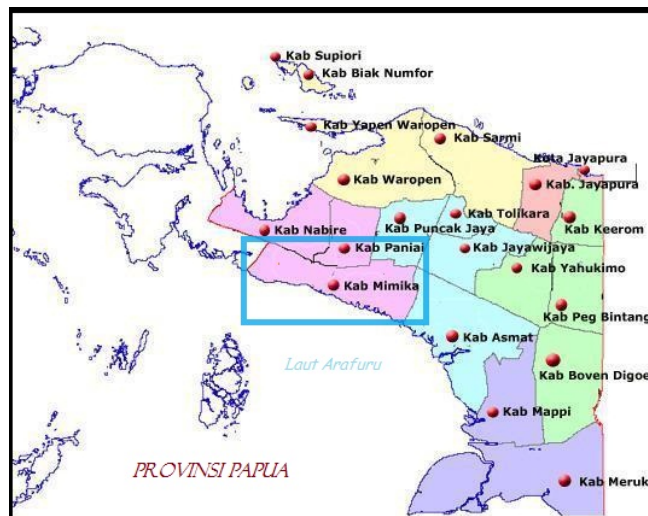
49. Kabupaten Mimika



Gambar 97
Lambang Kabupaten Mimika

49.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Timika. Awalnya Mimika merupakan sebuah kecamatan dari wilayah administrasi Kabupaten Fakfak, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, Kecamatan Mimika ditetapkan sebagai Kabupaten Administratif, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Mimika menjadi Kabupaten Otonom. Kabupaten Mimika memiliki luas sekitar 20.039 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua dengan topografi dataran tinggi dan rendah. Jumlah penduduknya sebesar 68.810 jiwa (2000)



Gambar 98
Peta Lokasi Kabupaten Mimika

49.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	94
Nama Provinsi	Papua
Kode Kabupaten	9412
Nama Kabupaten	Mimika
Balita Telantar	10.876 jiwa
Anak Telantar	39.846 jiwa
Lanjut Usia Telantar	1.479 jiwa
Penyandang Cacat	418 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.883 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	13.435 RT
Miskin	11.682 RT
Hampir Miskin	5.705 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	19.671 RT

B. PSKS

Kode Provinsi	94
Nama Provinsi	Papua
Kode Kabupaten	9412
Nama Kabupaten	Mimika
Pekerja Sosial Masyarakat	50 Orang
Organisasi Sosial	15 Orsos
Karang Taruna	56 KT
Dunia Usaha yang melakukan Usaha	2 DU
Kesejahteraan Sosial	
Wahana Sosial Berbasis Masyarakat	4 WKSMB

49.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Mimika Jl. CendraWasih SP II Ruko Timika

49.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009

b. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 1.215 KK atau 5.623 jiwa. Semuanya belum diberdayakan

B. Kegiatan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

a. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran antara lain Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 23 orang Korban Tindak Kekerasan tahun 2003, dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 55 orang KTK tahun 2004

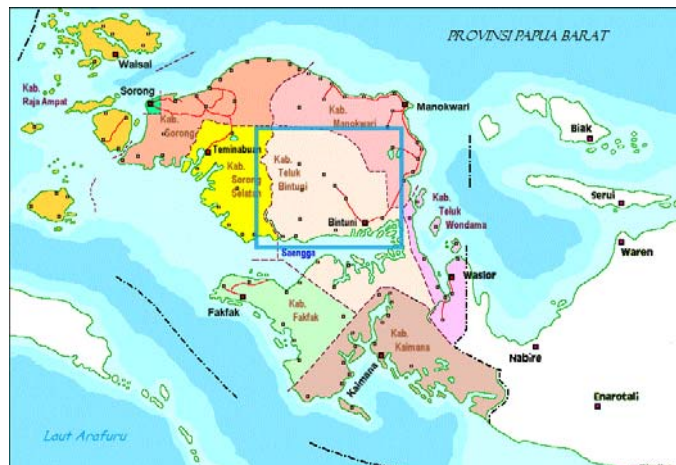
50. Kabupaten Teluk Bintuni



Gambar 99
Lambang Kabupaten Teluk Bintuni

50.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Teluk Bintuni adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni terletak di bagian leher "kepala burung". Ia menghadap ke Laut Seram di lepas pantai barat Provinsi Papua Barat. Sebelum April 2003, wilayah ini merupakan bagian Kabupaten Manokwari. Luas wilayahnya meliputi area 18.637 Km² Dengan jumlah Penduduk sebesar 34.525 jiwa (2000). Situs web resmi: <http://www.bintunikab.go.id>.



Gambar 100
Peta Lokasi Kabupaten Teluk Bintuni

50.2. PMKS dan PSKS Sasaran Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

A. PMKS

Kode Provinsi	91
Nama Provinsi	Irian Jaya Barat
Kode Kabupaten	9104
Nama Kabupaten	Teluk Bintuni
Balita Telantar	3.327 jiwa
Anak Telantar	13.269 jiwa
Lanjut Usia Telantar	665 jiwa
Penyandang Cacat	123 jiwa
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	584 jiwa
Keluarga Fakir Miskin	
Sangat Miskin	1.914 RT
Miskin	2.332 RT
Hampir Miskin	3.713 RT
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	7.750 RT

50.3. Nomenklatur Dinas/Instansi Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni Jalan Raya Bintuni Timur Telp. (0956) 31001 Fax. (0956) 31200 (Sekda Kab. Teluk Bintuni).

50.4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

A. Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

a. Direktorat Pemberdayaan Keluarga

Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tahun 2009

b. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

Pembinaan 20 Kelompok Usaha Bersama BPLS pada tahun 2007.

c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 465 KK atau 2.045 jiwa. Sudah

diberdayakan sebanyak 54 KK (265 jiwa), sedangkan 411 KK (1.780 jiwa) belum diberdayakan.

B. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penelitian tentang masalah kebutuhan dan sumber daya sosial tertinggal dan atau perbatasan pada tahun 2009.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial RI dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya dalam upaya pengentasan Kabupaten Daerah Tertinggal dari masalah kemiskinan, maka visi dan misi yang akan dicapai adalah :

A. Visi Kementerian Sosial RI

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kabupaten Daerah Tertinggal”

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan kesejahteraan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang berkejahteraan sosial.

Kondisi ini merupakan tujuan ideal dan sekaligus upaya agar masyarakat dapat terbebas dari masalah-masalah sosial, menghindari terjadinya kesenjangan yang tinggi di bidang kesejahteraan sosial dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia, serta sebagai pencerminan negara yang berketuhanan, aman, makmur, dan berkeadilan sosial.

B. Misi Kementerian Sosial RI

Sebagai kementerian/lembaga, Kementerian Sosial RI mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial RI menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan dan kurang beruntung;
2. Mengembangkan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi kelompok rentan dan kurang beruntung;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial, partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat penyelenggara kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

C. Tujuan

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Daerah Tertinggal adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas, keterpaduan, dan kualitas pelayanan, perlindungan serta rehabilitasi bagi anak, penyandang cacat, lanjut usia,;
2. Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pekerja migran, korban tindak kekerasan dan kelompok rentan lainnya;
5. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas serta taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan KAT;
6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel;
8. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial;
9. Meningkatkan manajemen sistem informasi kesejahteraan sosial;
10. Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
11. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan tata laksana kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

D. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial RI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kebijakan dan strategi Kementerian Sosial RI dalam pengentasan Kabupaten Daerah Tertinggal dari masalah kemiskinan lebih diarahkan pada:

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

3. Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan tujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-

- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan Kementerian Sosial RI pada pembangunan kesejahteraan sosial di lokasi Kabupaten Daerah Tertinggal diarahkan untuk:

1. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi.
4. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial pada lokasi Kabupaten Daerah Tertinggal difokuskan pada:

1. Kampanye sosial, yang mengandung makna memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Kemitraan sosial, yang mengandung makna adanya kerja sama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
3. Partisipasi sosial, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
4. Advokasi dan pendampingan sosial, yang mengandung makna adanya upaya-upaya memberikan perlindungan, pembelaan, dan asistensi terhadap hak-hak dasar warga masyarakat

BAB IV

AZAS-AZAS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Upaya pengentasan lokasi kabupaten daerah tertinggal dari masalah kemiskinan perlu memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keadilan, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatis dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Keberlanjutan, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga dapat tercapai kemandirian.
4. Kemanfaatan, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup setiap warga negara.
5. Kemitraan, dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
6. Kesetiakawanan, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
7. Keterbukaan, memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Keterpaduan, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
9. Partisipasi, dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
10. Profesionalitas, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

BAB V

PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI di lokasi Kabupaten Daerah Tertinggal diarahkan kepada upaya-upaya pengentasan masyarakat dari masalah kemiskinan dengan indikator dampak (*impact*) yang ingin dicapai diarahkan kepada: (i) peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (ii) peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan (iii) peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program prioritas Kementerian Sosial RI di lokasi Kabupaten Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

A. Program Rehabilitasi Sosial

Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan merupakan salah satu tugas pokok Kementerian Sosial RI adalah memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap para PMKS.

Untuk mendukung visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial RI di lokasi Kabupaten Daerah Tertinggal, program rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Sosial Anak;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelenggarakan usaha penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan keluarga, dan pengangkatan anak. Tujuan dari program-program yang dilaksanakan dalam pelayanan sosial anak adalah mengembalikan fungsi utama pengasuhan kepada keluarga.

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, penanganannya dilaksanakan dalam panti dan luar panti dengan penanganan yang sedang dikembangkan melalui model *restorative justice*. Penanganan anak dengan disabilitas memberikan peluang untuk menempatkan anak dengan kecacatan sejajar dengan anak pada umumnya, terutama terkait dengan pemenuhan hak-haknya. Sementara untuk anak balita, lebih berbentuk *day care* dan lebih berorientasi untuk mengatasi permasalahan gizi buruk anak di bawah usia lima tahun dan *family support*. Permasalahan anak dengan permasalahannya yang sudah semakin spesifik disebut sebagai Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan

Khusus (AMPK) yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang berasal dalam kelompok minoritas, perdagangan anak, dan lain-lain. Hal ini menggambarkan sudah semakin kompleksnya permasalahan dan penanganan yang diperlukan.

2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia;

Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah salah satu kegiatan yang memfokuskan pada pelayanan sosial bagi lanjut usia. Pelayanan yang diberikan meliputi:

- a. Program pelayanan lansia dalam panti yang meliputi: pelayanan reguler, pelayanan harian (*day care services*), pelayanan subsidi silang,
- b. Program pelayanan lansia luar panti yang meliputi: *home care services*, *foster care*, *day care services*, UEP, Kube (bantuan dan pembinaan).
- c. Program kelembagaan meliputi: jejaring antarlembaga nasional dan internasional, koordinasi antar dan intersektor, penyelenggaraan HLUN (Hari Lanjut Usia Nasional) dan HLUIN, pembinaan dan pemberdayaan lembaga lansia.
- d. Perlindungan dan aksesibilitas meliputi Jaminan Sosial Lanjut Usia/JSLU, Trauma Centre, aksesibilitas sosial, pelayanan kedaruratan, dan jaringan penanganan antar lembaga.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan; (i) dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan lanjut usia, (ii) sistem perlindungan dan jaminan sosial yang dapat meningkatkan kehidupan penduduk lanjut usia, (iii) kesempatan kerja dan aktivitas untuk mengaktualisasikan diri dalam keluarga dan masyarakat, (iv) iklim kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian, dan (v) aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum.

3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, merupakan salah satu kegiatan yang diarahkan untuk membantu penyandang cacat melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat. Upaya pelayanan bagi penyandang cacat tersebut dilakukan melalui; (i) rehabilitasi sosial, (ii) bantuan sosial, (iii) pemeliharaan taraf hidup, dan (iv) aksesibilitas. Adapun kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui:

- a. *Institutional-based* yang mencakup program reguler, multilayanan dan *multitarget group* melalui *day care* dan subsidi silang, dan program khusus

yang meliputi *outreach*, unit pelayanan sosial keliling (UPSK) dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM).

- b. *Non-institutional-based* yang mencakup pelayanan pendampingan *family-based* (berbasiskan keluarga) dan *community-based* (berbasiskan masyarakat) yang menyelenggarakan RBM, serta pelayanan-pelayanan lain mencakup UPSK, loka bina karya (LBK), praktik belajar kerja (PBK), UEP/Kube.
- c. Pemeliharaan taraf hidup/bantuan sosial.

4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama yang berbasis masyarakat;
- b. Meningkatkan koordinasi intra dan interinstansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat;
- c. Mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial korban napza;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza, baik secara fisik maupun sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial;
- e. Mengembangkan dan menyediakan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, baik secara fisik maupun sumber daya, dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial;
- f. Mengembangkan dan menyediakan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza.

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan mencakup: (i) pencegahan, (ii) rehabilitasi sosial, (iii) pengembangan dan pembinaan lanjut, (iv) kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial.

5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial;

Kegiatan dan rehabilitasi sosial adalah kegiatan bagi PMKS yang masuk dalam kelompok tunasusila, gelandangan dan pengemis, dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan serta pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif dalam rangka pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tunasosial serta bimbingan teknis dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila

(wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis, dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui upaya-upaya tersebut tidak hanya tertanganinya masalah tunasosial tetapi juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya serta dapat bersosialisasi di tengah masyarakat lingkungannya.

Upaya-upaya pelayanan dan rehabilitasi tunasosial dalam rangka mencapai sasaran pelayanannya mencakup:

- a. pelayanan dan rehabilitasi tunasusila: wanita penaja seks, waria penaja seks
- b. pelayanan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis
- c. pelayanan dan rehabilitasi eks narapidana
- d. pelayanan dan rehabilitasi orang dengan HIV dan AIDS

B. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial merupakan salah satu instrumen pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan peranti dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat melalui pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, terencana, terprogram dan sistematis.

Program dan kegiatan telah dirancang untuk mengantisipasi berbagai tantangan dengan mengedepankan prioritas kebutuhan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, ataupun NGO (organisasi nonpemerintah) lokal dan internasional telah menciptakan peluang untuk bersama-sama mengentaskan permasalahan.

Pergeseran paradigma Program Bantuan dan Jaminan Sosial menjadi Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan terobosan dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan. Pergeseran tersebut selanjutnya lebih fokus pada arah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial selama kurun waktu 2010-2014 kepada upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, yaitu penduduk "rentan", serta penduduk yang memiliki risiko. Penduduk berisiko adalah penduduk miskin kluster I dan II serta penduduk lainnya yang karena faktor tertentu tidak memiliki kepastian masa depan. Sementara yang termasuk penduduk rentan adalah masyarakat yang tidak terlepas dari berbagai bencana, tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial. Pergeseran tersebut seiring dengan mandat yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea IV serta Pasal 34 ayat (1) dan (2).

1. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kegiatan bantuan sosial korban bencana alam difokuskan pada masalah-masalah sosial yang ditimbulkan sebagai eksekusi dari bencana alam. Pengurangan risiko bencana menjadi salah satu prioritas penanganan utama dari upaya bantuan sosial bagi korban bencana. Upaya pengurangan risiko bencana ini dilakukan melalui:

- a. Memperkuat sistem dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu di pusat dan di daerah melalui:
- b. Kesiapsiagaan untuk dilakukannya penguatan kesiapsiagaan bantuan darurat, peralatan evakuasi dan mobilisasi kendaraan siaga bencana serta menyiapkan masyarakat untuk memahami risiko bencana yang mengancam melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan geladi lapangan penanggulangan bencana;
- c. Tanggap darurat melakukan aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelibatan personel pelatih dalam penanggulangan bencana;
- d. Pascabencana, melakukan rehabilitasi sosial secara fisik maupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah, santunan sosial, dan bantuan pemberdayaan ekonomi produktif;
- e. Membangun model penanggulangan bencana bidang bantuan sosial dengan menggunakan pendekatan *community-based development* atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan produk "kampung siaga bencana".

2. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Kegiatan bantuan sosial korban bencana sosial ke depan diarahkan pada tiga tahapan penanggulangan bencana sosial yang difokuskan untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial dengan mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial. Dalam pelaksanaannya, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Prabencana, melalui kegiatan yang bernuansa pencegahan dengan memperhatikan karakteristik permasalahan bencana sosial maka upaya yang dikembangkan diarahkan pada penguatan potensi lokal untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial. Komponen kegiatan yang akan terus dikembangkan adalah keserasian sosial dan penggalan kearifan lokal.
- b. Tanggap darurat merupakan kegiatan pemberian bantuan darurat berupa bantuan makanan, sandang, dan papan bagi korban bencana sosial.
- c. Rehabilitasi sosial merupakan bantuan pascabencana yang dititikberatkan pada pemulihan korban. Penanganan dilakukan melalui tiga pola, yaitu

melalui pemulangan ke daerah asal, terminasi/pemberdayaan di lokasi pengungsian, dan *resettlement* pada lokasi baru.

3. Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kegiatan bantuan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran difokuskan pada upaya perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Pemulangan ke daerah asal dan pemberian makanan selama di penampungan bagi pekerja migran bermasalah;
- b. Rehabilitasi psikososial melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
- c. Bantuan Usaha Ekonomis Produktif sebagai bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah.

4. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Dana hibah dalam negeri yang dulu dikenal sebagai dana usaha kesejahteraan sosial merupakan sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau permasalahan kesejahteraan sosial yang tidak dapat disentuh oleh APBN yang alokasinya terbatas. Oleh karena itu, pengumpulan dan pengelolaannya perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan dan pemrosesan SK izin undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB);
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan dana hibah dalam negeri bagi kemanfaatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berisiko sosial;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Jaminan Kesejahteraan Sosial

Jaminan Sosial Nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial atau *compulsory social insurance*, yang dibiayai dari kontribusi/premi yang dibayarkan oleh setiap

tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Kontribusi/premi dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (*social assistance*) baik dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayaan dari negara dan bantuan sosial masyarakat lainnya.

Mekanisme jaminan sosial berbasiskan masyarakat yaitu penggalangan dana secara swadaya untuk memberikan jaminan sosial bagi komunitas lokal telah tumbuh secara turun-temurun di masyarakat seperti jimpitan, arisan, baitulmal, ataupun kegiatan serupa dengan istilah yang berbeda di setiap daerahnya. Pada perkembangannya, sistem jaminan sosial yang dibangun tidak dapat menysasar kelompok berisiko, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dikembangkan sistem jaminan sosial dengan sasaran kelompok yang tidak dapat tercakup oleh sistem jaminan sosial konvensional.

Askesos merupakan program strategis karena selama ini belum ada program pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*) yang berskala nasional bagi masyarakat miskin atau marginal yang ada di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya program Askesos ini bermitra dengan organisasi sosial/yayasan/lembaga yang telah dibina oleh Kementerian Sosial RI sebagai pengelola atau pelaksana di lapangan dengan membentuk Tim Pengelola Askesos.

Askesos adalah jaminan pertanggungan dalam bentuk penggantian pendapatan keluarga bagi warga masyarakat pekerja mandiri pada sektor informal terhadap risiko menurunnya kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama mengalami sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia sehingga berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga.

6. Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang diujicobakan pada tahun 2007.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan yang dapat mengubah perilaku. Diutamakan rumah tangga sangat miskin yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum selesai pendidikan dasar. Tujuan jangka pendeknya adalah memberikan *income effect* melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sementara tujuan jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM melalui: peningkatan kualitas

kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) serta memberikan kepastian akan masa depannya (*insurance effect*) dan mengubah perilaku (*behaviour effect*) keluarga miskin.

Sebagai kegiatan yang menjadi prioritas nasional, fokus pelaksanaan pada lima tahun mendatang dititikberatkan pada perluasan jangkauan target RTSM dan wilayah pelaksanaan kegiatan PKH.

C. Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (UU Nomor 11 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan sosial, telah ditetapkan struktur organisasi yang menjadi wadah penggerak berjalannya fungsi secara optimal, mempertimbangkan lingkup tugas yang meliputi pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil (KAT) serta pendayagunaan nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bagian keempat Pasal 12 dan Pasal 13 telah menempatkan pemberdayaan sosial sebagai bagian integral dalam sistem kesejahteraan sosial nasional. Oleh karena itu Pemberdayaan Sosial mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan

a. Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk kategori kemiskinan kronis

(*chronic poverty*) yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin, termasuk kategori kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah warga yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara akibat perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam, dan bencana sosial seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Komponen kegiatan pemberdayaan fakir miskin, mencakup:

- 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (Kube).
- 2) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-Kube Sejahtera untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi Kube fakir miskin.
- 3) Rehabilitasi sosial daerah kumuh untuk mendorong partisipasi warga agar peduli dan tetap memelihara budaya gotong royong serta kesetiakawanan sosial terhadap keluarga-keluarga fakir miskin di lingkungannya.
- 4) Santunan hidup dan akses jaminan sosial merupakan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin untuk memelihara taraf kesejahteraan sosialnya dalam jangka waktu sampai kegiatan usaha ekonomi produktif telah menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
- 5) Pengembangan kemitraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan untuk menumbuhkan jalinan kerja sama yang setara antarperseorangan, kelompok, organisasi (Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM/orsos, kalangan perbankan) yang memiliki komitmen bekerja sama dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan.
- 6) Pengembangan Desa Miskin/Adopsi Desa Miskin yang bertumpu pada pendekatan pengembangan masyarakat (*community development*).

- 7) Manajemen pelayanan kesejahteraan sosial fakir miskin untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program bisa tercapai.

Sasaran kegiatan program pemberdayaan fakir miskin diarahkan pada: (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah hutan masyarakat, perdesaan/pertanian, suburban, perkotaan, pesisir/pantai, kepulauan terpencil, dan perbatasan antarnegara, dan (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam, korban bencana sosial/korban konflik sosial, terkena pemutusan hubungan kerja, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga.

b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan kelompok sosial-budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (Keppres Nomor 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil). Kriteria umum komunitas adat terpencil, terdiri atas: (1) berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen, (2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, (3) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem, (4) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau, (5) peralatan dan teknologinya sederhana, (6) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber alam setempat relatif tinggi, dan (7) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Keberadaan suku-suku tertentu yang relatif tertinggal, terpencil, terasing dan belum banyak tersentuh oleh proses pembangunan cukup banyak dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, bahkan di Pulau Jawa yang relatif lebih maju dan aksesibilitasnya lebih tinggi. Suku-suku tertentu itu telah lama tinggal di daerahnya dengan budaya dan adat istiadat yang diturunkan dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Suku-suku tersebut pada umumnya masih memegang teguh adat dan budaya, cenderung tertutup serta menolak berbagai pengaruh budaya luar, bahkan proses pembangunan sekalipun. Beberapa di antaranya bahkan masih hidup dalam dunianya sendiri dan sangat jarang berinteraksi dengan

masyarakat lain di sekitarnya dan terpisah menjadi masyarakat terasing di dalam wilayah atau daerah tertentu.

KAT pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah, di mana eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT. Upaya yang dilakukan untuk mendukung meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan warga KAT, adalah sebagai berikut:

- 1) Permukiman dan penyediaan infrastruktur
- 2) Pemberian jaminan hidup
- 3) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan KAT

c. Pemberdayaan Keluarga

Permasalahan utama keluarga adalah kemiskinan, kerentanan dan kerawanan sosial sebagai akibat negatif dari modernisasi. Ketidakberdayaan keluarga akan berdampak pada ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi dan perannya, terutama membangun keluarga yang sejahtera; mampu memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi bagian masyarakat sejahtera. Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan keluarga, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Pemberian asuransi kesejahteraan sosial keluarga (AKSK) kepada keluarga yang menjadi sasaran kegiatan;
- 2) Pembentukan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) di tingkat kabupaten;
- 3) Pemberdayaan perempuan;
- 4) Pembentukan Pusdaka (Pusat Data Keluarga).

2. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Kelembagaan sosial masyarakat, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha. Kelembagaan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau

diprakarsai oleh pemerintah. Lebih dari itu, dapat berperan sebagai perekat dan penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, suatu kegiatan dapat bertahan lama dan berkelanjutan apabila didukung oleh kelembagaan lokal yang berakar pada masyarakat. Untuk mendukung pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka mendukung program pemberdayaan sosial, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan karang taruna
- b. Pemberdayaan organisasi sosial
- c. Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat
- d. Pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di tingkat desa
- e. Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di tingkat kecamatan

3. Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

Salah satu fungsi program pemberdayaan sosial adalah sebagai pengikat nilai-nilai kesatuan NKRI. Untuk tumbuhnya nilai-nilai kepedulian serta kecintaan terhadap bangsa dan negara, dan untuk menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial, bisa dilakukan melalui upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Untuk mendukung upaya tersebut dan menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, pengakuan sebagai Perintis Kemerdekaan (PK), Janda/Duda Perintis Kemerdekaan (JDPK), dan pemberian SLKS;
- b. Pemberian bantuan bulanan dan bantuan kesehatan keluarga pahlawan, PK, dan JDPK, serta bantuan perbaikan rumah;
- c. Sosialisasi dan aktualisasi nilai K2KS.

D. Penyuluhan Sosial

Tujuannya, meningkatkan kualitas penyuluhan sosial sebagai gerak dasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui promosi dan publisitas secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan kualitas penyuluhan sosial mencakup unsur-unsur pengembangan materi, bentuk dan teknik penyuluhan sosial, manajemen pelaksanaan penyuluhan sosial, jaringan lintas fungsi antarunit, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyuluhan sosial, peningkatan kemampuan tenaga penyuluh ahli dan penyuluh lapangan.

E. Pola Konsentrasi

Pola konsentrasi ditetapkan sebagai kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial untuk pemberdayaan masyarakat di kabupaten tertinggal, terpencil dan perbatasan antar negara. Tujuan pola konsentrasi membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah dan industri. Sehingga terbentuk adalah membentuk Desa Berketahanan Sosial, di mana masyarakat dapat mandiri dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Adapun mekanisme Pola Konsentrasi, sebagai berikut :

T_0 = Kegiatan Pra Kondisi secara terintegrasi inter dan antar departemen/kementerian untuk merumuskan bidang tugas dalam bentuk riset dan stimulan. Konfirmasi/validasi data dengan pemerintah daerah dan stakeholders.

T_1 = *Action Plan* sesuai dengan bidang tugasnya dengan pemberian bantuan dan pendampingan dari unit teknis terkait berdasarkan hasil laporan pra kondisi melalui riset dan stimulan.

T_2 = Pengembangan LKM (lembaga keuangan mikro)

T_3 = Penguatan Kemitraan

T_4 = Terminasi

BAB VI

SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN

Sumber pendanaan pembangunan untuk 50 Kabupaten Daerah Tertinggal berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Pembangunan 50 Kabupaten Daerah Tertinggal membutuhkan dukungan anggaran dari semua sektor/unit kerja di lingkup Kementerian Sosial RI RI, untuk itu diharapkan pada setiap unit kerja di masing-masing unit eselon I mengalokasikan anggaran melalui DIPA masing-masing dengan memprioritaskan daerah 50 kabupaten yang telah ditetapkan.
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Pada hakekatnya pembangunan Kabupaten Daerah Tertinggal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk itu pemerintah daerah tentunya wajib pula memprioritaskan pengalokasian dananya untuk mengatasi ketimpangan daerahnya, baik melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
3. Dana Swasta dan Masyarakat
Untuk pendanaan pada wilayah kabupaten Kabupaten Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan dapat diperoleh dari dana yang dikelola langsung oleh masyarakat, Lembaga non pemerintah, dan investasi dunia usaha.
4. Bantuan Luar Negeri (BLN)
Pendanaan yang dilaksanakan dengan hubungan kerjasama antar negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau pembangunan kesejahteraan sosial.

BAB VII

PENUTUP

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal merupakan gambaran tentang kondisi pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Daerah Tertinggal. Tidak terlepas pula jenis permasalahan yang ada di wilayah tersebut meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal menampilkan kondisi geografis, data sasaran garapan kesejahteraan sosial meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial serta sasaran prioritas, nomenklatur Dinas/Instansi Sosial dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Teknis lingkup Kementerian Sosial RI RI. Kebijakan dan perencanaan kesejahteraan sosial diarahkan untuk pengentasan 50 Kabupaten Daerah Tertinggal. Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, profil ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial bagi 50 Kabupaten Daerah Tertinggal serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (*stake holders*) baik Pemerintah, Dunia Usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan (*beneficiaries/ customer*) pembangunan kesejahteraan sosial.

Profil ini diharapkan dapat menjadi dokumen acuan untuk memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial dan kondisi setempat yang unik dan spesifik bagi 50 Kabupaten Daerah Tertinggal.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA